



Field Report

Kredit Perdesaan di Kabupaten Cirebon Jawa Barat

Temuan, pandangan dan interpretasi dalam laporan ini digali oleh masing-masing individu Tim SMERU dan tidak berhubungan atau mewakili Group Bank Dunia maupun lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan SMERU. Mohon hubungi kami di nomor telepon: 62-21-336336; Fax: 62-21-330850; E-mail: smeru@smeru.or.id; Web: www.smeru.or.id

**Hudi Sartono
Bambang Soelaksono
Sri Kusumastuti Rahayu**

Laporan khusus dari Social Monitoring and Early Response Unit (SMERU). Suatu Unit yang didukung oleh Bank Dunia, AusAID, ASEM, dan USAID

FINAL
September 2000

PENGANTAR

Laporan lapangan (Field Report) dari **Kabupaten Cirebon – Jawa Barat** ini merupakan bagian dari Studi Tim Dampak Krisis SMERU tentang Kredit Perdesaan yang mewakili wilayah nelayan dan padi sawah. Wilayah lain yang juga diamati termasuk Kabupaten Minahasa – Sulawesi Utara (perkebunan), Kabupaten Kupang - NTT (lahan kering), dan Kabupaten Tanggamus (padi sawah dan nelayan).

Studi yang diselenggarakan pada bulan Juni 2000 ini bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran tentang keberadaan perkreditan di wilayah perdesaan
2. Mengetahui perubahan keberadaan kredit perdesaan sebagai akibat krisis ekonomi
3. Memberikan masukan tentang jenis kredit yang diminati masyarakat perdesaan; dan
4. Mengetahui kiat penanggulangan dalam masa krisis berkaitan dengan aksesibilitas masyarakat desa pada kredit pedesaan

Studi dilakukan oleh para peneliti Tim Dampak Krisis SMERU, dua peneliti per kabupaten, yang langsung menggali informasi di lapangan (desa, kecamatan, dan kabupaten) selama kurang lebih tiga minggu. Studi literatur juga dilakukan sebelum SMERU menggali informasi di lapangan.

Laporan lengkap tentang Kredit Perdesaan dari keempat wilayah akan diterbitkan sebagai Laporan Khusus SMERU.

Jakarta, September 2000
Koordinator Tim dampak Krisis SMERU

John Maxwell

SINGKATAN dan PENGERTIAN

ABRI	=	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
BKD	=	Bank Kredit Desa
BNI	=	Bank Negara Indonesia
BPR	=	Bank Perkreditan Rakyat
BRI	=	Bank Rakyat Indonesia
Dolog	=	Depot Logistik
GKG	=	Gabah Kering Giling
Inkopabri	=	Induk Koperasi Primer ABRI
Inkopad	=	Induk Koperasi Primer Angkatan Darat
Inkopal	=	Induk Koperasi Primer Angkatan Laut
Inkopau	=	Induk Koperasi Primer Angkatan Udara
Inkopol	=	Induk Koperasi Primer Polisi
JTU	=	Juru Tata Usaha
Kosipa	=	Koperasi Simpan Pinjam
Koveri	=	Koperasi Veteran Indonesia
KPD	=	Kader Pembangunan Desa
KUD	=	Koperasi Unit Desa
Kupedes	=	Kredit Umum Pedesaan
Kukesra	=	Kredit Usaha Keluarga Sejahtera)
KUT	=	Kredit Usaha Tani
LKMD	=	Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
MG	=	Musim Gadu
MH	=	Musim Hujan
MT	=	Musim Tanam
MTMH	=	Musim Tanam Musim Hujan
PDM-DKE	=	Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi
PKK	=	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
PPI	=	Pusat Pendaratan Ikan
PT	=	Perseroan Terbatas
Simpedes	=	Simpanan Masyarakat Pedesaan
SMERU	=	Social Monitoring and Early Response Unit
Takesra	=	Tabungan Keluarga Sejahtera)
TKW	=	Tenaga Kerja Wanita, Tenaga kerja perempuan Indonesia yang bekerja di luar negeri (umumnya istilah ini digunakan untuk ' <i>unskill worker</i> ', misalnya pembantu rumah tangga)
TPI	=	Tempat Pelelangan Ikan
UED-SP	=	Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam
UPPK (UP2K)	=	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	i
DAFTAR SINGKATAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK DAN DIAGRAM	v
BAB I. METODA PENGAMATAN	1
BAB II. KARAKTERISTIK DESA PENGAMATAN	1
2.1 Gambaran Umum Wilayah Pengamatan	3
2.2 Struktur Ekonomi Masyarakat Desa	5
2.3 Dinamika Ekonomi Masyarakat Selama Krisis Ekonomi	14
BAB III. KREDIT PERDESAAN: AKSES DAN PILIHAN MASYARAKAT	15
3.1 Skema Kredit Perdesaan	15
3.1.1 Kredit Formal	15
1. Bank Rakyat Indonesia (BRI)	16
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	19
3. Badan Kredit Desa (BKD)	20
4. Koperasi Unit Desa (KUD)	23
3.1.2 Kredit Program	25
1. Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (UED-SP)	26
2. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	26
3. PDM-DKE	28
3.1.3 Kredit Informal	28
1. Bank Harian/Bak Keliling/ <i>Rentenir</i>	28
2. Kredit Barang (" <i>mijndreeng</i> " = <i>mindring</i>)	30
3. Warung/kios	31
4. Arisan	32
3.1.4 Kredit Jaringan Kerja/Usaha	33
1. Jaringan kerja nelayan rajungan	33
2. Jaringan kerja nelayan kerang	34
3. Jaringan ikan asin dan ikan segar	34
3.2 Akses, Hambatan, dan Pilihan Masyarakat terhadap Kredit	40
3.2.1 Aksesibilitas	40
3.2.2 Hambatan	41
3.2.3 Pilihan dan Harapan	43
BAB IV. KESIMPULAN	44
LAMPIRAN	49
Lampiran 1	
Lampiran 2	
Foto dan Guntingan berita di koran	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Jumlah Penduduk Kecamatan Cirebon Utara Menurut Mata Pencarian (akhir Maret 2000)	3
2. Pola Umum Musim Penangkapan Ikan oleh Nelayan di Perairan Bondet	6
3. Pola Usahatani Padi Sawah di Desa Buyut	9
4. Pola Usahatani di Desa Buyut dalam 5 Musim Tanam Terakhir	10
5. Perubahan Harga Beberapa Sarana Produksi Pertanian (Sapotran)	13
6. Rakapitulasi Posisi Pinjaman Kupedes dan Simpedes - BRI Unit Sub Area Mikro Cirebon	17
7. Rakapitulasi Posisi Pinjaman Kupedes dan Simpedes - BRI Unit Klayan, Kecamatan Cirebon Utara	18
8. Pola Pinjaman, Kekayaan, Rugi/Laba, dan Posisi Kas BKD	23

DAFTAR GRAFIK DAN DIAGRAM

		Halaman
Grafik 1	Perkembangan Posisi Kupedes dan Simpedes – BRI Unit Sub Area Mikro Cirebon	17
Grafik 2	Perkembangan Posisi Kupedes dan Simpedes - BRI Unit Klayan, Kecamatan Cirebon Utara	18
Diagram 1	Struktur Organisasi BKD dan Pembinaan BRI	21
Diagram 2	Struktur Organisasi UED - SP	27
Diagram 3	Jaringan Usaha dan Fasilitas Permodalan Komoditi Rajungan Di Desa Mertasinga/Bondet, Cirebon Utara	36
Diagram 4	Jaringan Usaha dan Fasilitas Permodalan Komoditi Kerang Di Desa Mertasinga/Bondet, Cirebon Utara	37
Diagram 5	Jaringan Usaha dan Fasilitas Permodalan Komoditi Ikan Asin Di Desa Mertasinga/Bondet, Cirebon Utara	38
Diagram 6	Jaringan Usaha dan Fasilitas Permodalan Komoditi Ikan Segar Di Desa Mertasinga/Bondet, Cirebon Utara	39

I. METODA PENGAMATAN

Khusus untuk kawasan pantai, Tim SMERU memutuskan mengunjungi Kabupaten Cirebon – Jawa Barat¹, yang juga dipilih untuk mewakili wilayah paling parah terkena dampak krisis. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh di Bappeda, telah dipilih satu kecamatan, yaitu Kecamatan Cirebon Utara dengan dua desa². Desa pertama yaitu Desa Mertasinga, mencirikan perkampungan nelayan. Desa kedua adalah Desa Buyut yang mencirikan perkampungan petani padi sawah dataran rendah.

Di tingkat kabupaten dan kecamatan dilakukan penggalan informasi ke berbagai lembaga birokrasi pemerintahan di daerah maupun lembaga-lembaga keuangan/perbankan dan bisnis yang ada, termasuk informasi yang tertuang dalam data sekunder. Tahapan ini sekaligus juga merupakan proses dalam menemukan dan menentukan wilayah desa yang kemudian dijadikan sebagai desa penelitian.

Di tingkat desa dilakukan wawancara mendalam. Selain kepada pamong desa, juga dilakukan wawancara mendalam terhadap masyarakat peminjam dan bukan peminjam kredit perdesaan (nelayan, petani, pemilik warung, ibu rumah tangga, guru, buruh rotan, industri kecil), pengelola kredit, nelayan, juragan, bakul, pemilik kapal, pengupas, pabrik pengolah ikan, ketua kelompok tani, tokoh masyarakat (petani terkaya di wilayah tersebut, tokoh agama, panutan masyarakat).

II. KARAKTERISTIK DESA PENGAMATAN

Kabupaten Cirebon

Kabupaten Cirebon yang beribukota di Sumber merupakan bagian dari wilayah Propinsi Jawa Barat yang terletak di bagian timur dan merupakan batas sekaligus sebagai pintu gerbang menuju Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Cirebon terdiri dari 424 desa dengan jumlah penduduk lebih dari 1,8 juta jiwa (1998).

Letak daratannya memanjang dari Barat Laut ke Tenggara. Dilihat dari permukaan tanah/daratannya dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, daerah dataran rendah, yaitu Kecamatan Gegesik, Kapatekan Arjawinangun, Klangean, Cirebon Utara, Cirebon Barat, Weru, Astanajapura, Lemahabang, Karangsembung, Waled, Ciledug dan Kecamatan Losari. Kecamatan-kecamatan ini pada umumnya terletak di sepanjang pantai utara (pantura) Pulau Jawa yang merupakan jalur lalu lintas jalan negara yang sangat ramai dan padat (lihat peta terlampir). Sebagian lagi terletak di daerah dataran sedang dan tinggi.

¹ Kunjungan pertama: 7 – 25 Juni 2000 (Desa Mertasinga); kunjungan kedua: 9 – 16 Juli 2000 (Desa Buyut)

² Di samping variabel-variabel administratif dan karakteristik kondisi perekonomian wilayah, pemilihan tersebut juga mempertimbangkan variabel 'keamanan' wilayah setempat. Perlu dikemukakan bahwa pada waktu kajian ini dilakukan di berbagai wilayah Kabupaten Cirebon sering terjadi berbagai konflik sosial, misalnya: tawuran massa antar kampung yang akhir-akhir ini meningkat baik dari segi intensitas maupun kuantitas.

Secara administratif geografis wilayah Kabupaten Cirebon berbatasan dengan beberapa daerah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Indramayu.
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan wilayah Kabupaten Majalengka.
- Sebelah Timur, berbatasan dengan wilayah Kota Cirebon dan Kabupaten Brebes (Jawa Tengah).

Secara topografis, wilayah kecamatan yang terletak di sepanjang jalur pantura termasuk dataran rendah dengan ketinggian antara 0 - 10 meter sedang wilayah kecamatan yang terletak di bagian selatan memiliki ketinggian antara 11 - 130 meter di atas permukaan laut.

Faktor iklim dan curah hujan di Kabupaten Cirebon dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang sebagian besar terdiri dari daerah pantai dan perbukitan terutama di daerah bagian utara, timur dan barat, sedang daerah bagian selatan merupakan daerah perbukitan.

Kabupaten Cirebon dilalui oleh 18 aliran sungai yang berhulu di bagian selatan. Sungai yang tergolong besar antara lain Cisanggarung, Ciwaringin, Cimanis, Cipager, Pekik, dan Kalijaga. Pada umumnya sungai-sungai besar tersebut, muaranya merupakan kawasan nelayan di samping merupakan sumber pengairan untuk persawahan. Di sepanjang 54 kilometer pantai Kabupaten Cirebon terdapat 35 desa pantai yang termasuk ke dalam enam wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Kapetakan, Cirebon Utara, Mudu, Astana Japura, Babakan dan Kecamatan Losari.

Tingkat kesejahteraan masyarakat desa-desa pantai, terutama nelayan masih tergolong rendah. Hal ini antara lain dapat dilihat dari kondisi rumah dan sanitasi lingkungan yang relatif buruk dan pendapatan yang relatif rendah. Sejumlah program dan proyek fisik maupun non-fisik terus dilancarkan di wilayah Kabupaten Cirebon guna memperbaiki tingkat kesejahteraan nelayan di sana.

Kecamatan Cirebon Utara

Luas Kecamatan Cirebon Utara adalah 22,55 Km², terdiri dari 15 desa dengan total penduduk 71.139 (per Maret 2000). Secara administratif, di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kapetakan, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Cirebon; sebelah barat dengan Kecamatan Weru dan Cirebon Barat, dan di sebelah timur adalah Laut Jawa.

Kecamatan Cirebon Utara berada pada jalur pantai utara dengan sarana komunikasi perhubungan lalu lintas yang lancar. Kecamatan ini berjarak 17 kilometer dari kota Sumber sebagai ibu kota Kabupaten. Meskipun karakter perdesaannya masih kuat, Kecamatan Cirebon Utara sering disebut sebagai 'daerah penyangga' atau 'satelit nya Kota Cirebon karena lokasinya hanya 20 kilometer dari Kota Cirebon.

Secara demografis, sektor nelayan dan buruh tani merupakan mata pencarian utama penduduk, diikuti oleh sektor usaha swasta, perdagangan, jasa pertukangan dan usaha tani serta pegawai negeri sipil dan ABRI serta pensiunan. Meskipun tidak ada data resmi, di kecamatan ini banyak tenaga kerja wanita (TKW) yang saat ini bekerja di luar negeri, terutama di Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Jumlah perempuan yang berminat bekerja sebagai TKW akhir-akhir ini diduga semakin meningkat. Di Kecamatan Cirebon Utara terdapat lebih dari 45 lembaga jasa dan/atau perorangan yang bertindak sebagai 'lembaga' penyalur TKW.

Wilayah ini memiliki cukup banyak sarana perdagangan seperti 159 toko dan 216 warung. Meskipun tidak memiliki sarana pasar sendiri, namun kecamatan ini hanya berjarak sekitar satu kilometer dari Pasar Celancang yang terletak di wilayah Kecamatan Kapatetakan. Pasar ini merupakan sarana perdagangan yang cukup ramai dan buka setiap hari.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kecamatan Cirebon Utara Menurut Mata Pencarian (akhir Maret 2000)

Jenis Mata Pencarian		Jumlah (orang)
1	Pegawai Negeri Sipil	1.914
2	ABRI	224
3	Swasta	4.113
4	Wiraswasta/pedagang	3.921
5	Usaha Tani	2.297
6	Jasa Pertukangan	3.126
7	Buruh Tani	12.178
8	Pensiunan	543
9	Nelayan	13.217
10	Pemulung	0
11	Jasa lainnya	576

Sumber. Diolah dari Monografi Kecamatan Cirebon Utara Hasil Registrasi Bulan Maret 2000. Diurut sesuai dengan sistim administrasi baku yang berlaku di kecamatan.

Kegiatan perekonomian masyarakat Kecamatan Cirebon Utara cukup ditunjang oleh keberadaan sarana jasa perbankan dan lembaga permodalan lainnya. Dua buah lembaga bank yang aktif adalah BRI Unit Klayan dan BPR Klayan. Terdapat pula delapan koperasi simpan pinjam (Kosipa), satu buah KUD yaitu KUD Mina yang berada di Desa Mertasinga (yang lebih dikenal sebagai KUD Bondet), serta Badan Kredit Desa (BKD) yang hampir merata terdapat di setiap desa.

2.1 Gambaran Umum Wilayah Pengamatan³

Desa Mertasinga dan Desa Buyut dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat ke arah utara dari Kota Cirebon. Keduanya terletak dalam satu jalur. Apabila menuju Desa Buyut akan melewati Desa Mertasinga terlebih dahulu. Desa Mertasinga adalah wilayah nelayan sedang Desa Buyut adalah wilayah pertanian padi sawah. Desa Buyut berlokasi sekitar 15 km kearah utara dari kota Cirebon, atau sekitar 7 km dari kantor Kecamatan Cirebon Utara. Sedangkan Desa Mertasinga separuh jarak dimaksud. Lokasi mudah ditempuh; apabila menggunakan kendaraan roda empat, dapat ditempuh dalam waktu 15 menit dari Kota Cirebon.

³ Disarikan dari Kabupaten Cirebon Dalam Angka 1998, dan Laporan Akhir Strategi Pengembangan Desa Pantai Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, maupun dari sumber-sumber lain yang dikumpulkan selama kajian ini dilakukan

Desa Buyut

Kantor Kepala Desa dapat ditempuh dari kota Cirebon dengan menggunakan kendaraan umum kecil sampai pasar Celancang dengan biaya Rp. 700 per orang, dilanjutkan dengan kendaraan umum sejenis menyusuri sungai irigasi teknis dengan biaya Rp. 700 per orang menempuh jarak kurang lebih 5 km. Kendaraan umum ini beroperasi dari pukul 3 dini hari hingga pukul 6 sore.

Desa telah dilengkapi sarana listrik. Empat orang memiliki telepon (pengusaha bengkel, pedagang mobil, toko pertanian), dan satu orang memiliki HP (petani kaya – pemberian anaknya). Sebagian penduduk menggunakan fasilitas air ledeng karena air sumur asin. Beberapa warga menggunakan antara air ledeng untuk minum dan memasak dan air sumur untuk keperluan lain seperti mandi dan cuci. Harga air ledeng dapat terjangkau. Sebagai ilustrasi, satu keluarga dengan dua anak dan satu cucu, membutuhkan air empat ember selama seminggu dengan harga Rp. 500.

*Kuwu*⁴ (Kepala Desa) yang ditemui Tim SMERU baru menjabat sebagai Kepala Desa beberapa bulan (sejak Nopember 1999) sehingga belum banyak menampakkan hasil. Para pamong termasuk *Kuwu* mendapat ‘gaji’ dari ‘tanah *bengkok*’⁵. Namun ketika didatangi Tim Peneliti SMERU, tampak bahwa mereka tidak puas dengan apa yang diperoleh selama ini. Lahan yang menjadi hak para pamong ini, sudah menjadi tradisi, disewakan kepada penggarap. Berdasarkan informasi petani yang pernah menyewa lahan tersebut, biasanya para pamong telah menyewakan setahun – bahkan 2 tahun – sebelum musim tanam. Harga sewa sebenarnya bisa mencapai Rp. 1,2 – Rp. 1,5 juta per ha (tergantung letak sawah), namun karena disewakan lebih awal maka hanya memperoleh nilai separonya (atau sekitar Rp. 600.000 per ha). Berdasarkan keterangan para pamong, hal ini terjadi karena warisan pamong sebelumnya yang telah menjual lebih awal sehingga penggantinya tidak memiliki hak hingga satu atau dua tahun kemudian. Dengan demikian mereka hanya mendapatkan sekitar Rp. 100.000 per bulan. Untuk mencukupi kebutuhan keluarganya mereka harus mempunyai ‘sambilan’. Beberapa istri pamong, juga bekerja (menjadi pedagang, atau lainnya). Biaya kegiatan desa mengandalkan dari sekitar 40% tanah *titisara*⁶.

Kegiatan Posyandu berjalan dengan sangat baik, antara lain penimbangan dan pencatatan, PMT⁷, kunjungan bidan dan imunisasi, imunisasi JPS, iuran posyandu/Rp. 100 per anak. Anak-anak kelihatan sehat. Pada Posyandu Blok I, hanya terdapat 3 anak di bawah garis merah dan telah mengalami perbaikan gizi dengan diberikan susu/vitadele bantuan.

⁴ *Kuwu* adalah istilah lokal untuk memanggil Kepala Desa. Masyarakat biasanya memanggil Kepala Desa dengan Pak *Kuwu*. Seorang mantan *Kuwu*-pun tetap dipanggil Pak *Kuwu* X (dengan menyebut namanya) walau ia tidak menjabat lagi.

⁵ Tanah *bengkok* adalah tanah Desa yang diperuntukkan sebagai gaji para Pamong Desa. Tanah ini tidak dapat diperjual-belikan, namun dapat diusahakan (disewakan) oleh Pamong Desa yang berhak dan hasilnya sebagai pengganti gaji. Luas tanah *bengkok* di Desa Buyut sekitar 27,5 ha (5 ha untuk ‘*Kuwu*’, 12,5 ha untuk kepala dusun masing-masing 2,5 ha, 10 ha untuk pamong Desa lain masing-masing 2 ha) dan sekitar 23 ha untuk tanah ‘*titisara*’.

⁶ Tanah *titisara* adalah tanah desa yang hasilnya diperuntukkan sebagai biaya operasional desa dan dikelola oleh Kepala Desa dan Pamong Desa. Tanah ini tidak dapat diperjual-belikan.

⁷ PMT adalah singkatan dari Pemberian Makanan Tambahan, suatu program untuk menambah gizi bagi Balita yang berada di bawah garis merah.

2.2 Struktur Ekonomi Masyarakat Desa

Desa Mertasinga (masyarakat nelayan)

Desa Mertasinga berstatus desa swasembada yang juga sering disebut sebagai Desa Bondet karena berada di perairan Teluk Bondet yang merupakan kawasan nelayan yang ramai. Dilihat dari pola tata guna tanah, Desa Mertasinga mempunyai total luas wilayah 89,2 hektar, 50% atau 40 hektar merupakan wilayah permukiman, dan sisanya atau sekitar 39 hektar merupakan areal empang dan kolam. Hanya 5 hektar yang merupakan areal persawahan sederhana (di Desa Mertasinga tidak ada sawah teknis maupun non teknis). Kondisi ini nampaknya seiring dengan mata pencaharian masyarakatnya yang mayoritas juga hidup dari sektor perikanan.

Jumlah penduduk desa Mertasinga adalah 5.264 jiwa. Dari jumlah itu, terdapat 1.630 jiwa penduduk yang bekerja. 773 jiwa (47,4%) yang mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan (184 jiwa sebagai nelayan pemilik perahu dan 589 jiwa sebagai buruh nelayan), dan 545 jiwa (33,4%) sebagai bakul atau pedagang ikan. Dengan kata lain 80% penduduk Desa Mertasinga menggantungkan hidupnya dari laut pada sektor perikanan.

Ada kecenderungan bahwa tingkat kesadaran pendidikan di antara komunitas nelayan di Desa Mertasinga masih rendah. Hal ini tampak dari hampir 70% penduduk (3.524 jiwa) mempunyai latar belakang pendidikan tidak tamat atau tamat sekolah dasar atau buta huruf. Pekerjaan sebagai nelayan tidak membutuhkan pendidikan formal tinggi. Faktor ini diduga kuat merupakan salah satu alasan rendahnya minat orang tua di Desa Mertasinga untuk menyekolahkan anaknya hingga jenjang yang lebih tinggi⁸. Potensi laut yang besar dan luas serta siap dieksplorasi oleh siapapun setiap saat (*free to entry area*) telah mendorong anak-anak laki-laki di Desa Mertasinga (yang sudah dianggap mampu bekerja) untuk melaut daripada bersekolah. Terlebih lagi ketika disadari bahwa bekerja sebagai nelayan relatif tidak membutuhkan modal besar. Kenyataan ini mungkin juga didorong oleh kondisi kehidupan rumah tangga nelayan yang miskin, khususnya di kalangan yang tidak memiliki perahu sendiri, yang telah 'memaksa' orang tua untuk 'mengajak' anaknya agar sesegera mungkin dapat membantu bekerja menangkap ikan di laut sebagai upaya mencukupkan kebutuhan rumah tangganya.

Alasan untuk segera dapat keluar dari kemiskinan telah menyebabkan banyak orang tua di Desa Mertasinga 'memberikan ijin' kepada kaum perempuan (istri maupun anak perempuan) bekerja sebagai TKW ke Arab Saudi atau negara-negara lainnya di kawasan Timur Tengah. Diperkirakan terdapat lebih dari 150 TKW yang berasal dari Desa Mertasinga. Uang hasil bekerja sebagai TKW dikirim melalui pelayanan pos atau Bank BNI; kebanyakan telah dipergunakan untuk membangun rumah. Di Desa Mertasinga kini banyak ditemui rumah-rumah 'cantik' dengan porselin dan keramik warna mencolok dan perempuan dengan kalung emas dari Arab Saudi. Kenyataan semacam ini diduga kuat sebagai salah satu daya tarik yang telah mendorong banyak kaum perempuan mengambil keputusan untuk bekerja sebagai TKW. Kegiatan nelayan sangat tergantung pada musim laut. Dalam kurun waktu setahun dapat dibedakan dalam pola sebagai berikut⁹

⁸ Pernyataan di atas masih merupakan sebuah hipotesa yang masih perlu dikaji lebih lanjut.

⁹ Pola musiman nelayan berlaku spesifik dan lokalistik. Pola ini khusus berlaku untuk perairan laut Teluk Bondet Cirebon. Kondisi ini memungkinkan masyarakat Bondet melakukan penangkapan ikan sampai keluar daerah. Sebaliknya, pada musim-musim tertentu banyak nelayan luar daerah yang datang menangkap ikan ke perairan teluk Bondet Cirebon.

Tabel 2. Pola Umum Musim Penangkapan Ikan oleh Nelayan di Perairan Bondet

Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kondisi tangkapan ikan	Rendah				Sedang				Baik			

Rendah : kondisi jumlah ikan di laut sangat sedikit (sepi)
Sedang : kondisi jumlah ikan di laut mulai cukup banyak
Baik : kondisi jumlah ikan di laut mulai banyak (ramai)

Di kalangan nelayan dikenal istilah “Angin Timur” yang artinya musim tidak banyak badai dan laut agak teduh sehingga mereka dapat melaut. Dan “Angin Barat” adalah di saat laut berangin dan banyak badai, sangat berbahaya bagi nelayan untuk melaut. Khusus untuk “nelayan rajungan”, saat ideal melaut adalah ketika cuaca laut sedang dan sedikit badai dimana rajungan naik ke atas permukaan dan mudah ditangkap dengan jaring. Kapal (perahu) yang dimiliki pada umumnya ukuran kecil dan sederhana sehingga tidak memungkinkan nelayan melaut setiap saat karena setiap hari kondisi laut selalu berubah-ubah tergantung pada cuaca dan angin. Menurut keterangan dari KUD “Mina Waluyo” dan Kantor Pusat Pendaratan Ikan (PPI) di Bondet, frekuensi rata-rata melaut nelayan di sana adalah sekitar 15 s/d 20 kali dalam satu bulan.

Frekuensi melaut nelayan secara potensial dapat ditingkatkan bilamana mereka memiliki kapal “Dogolan” ukuran lebih besar, sehingga mampu mengarungi laut lebih jauh dari garis pantai. Meskipun demikian, harga kapal Dogolan relatif sangat mahal dan sulit terjangkau oleh kemampuan kebanyakan nelayan di perairan Bondet. Harga sebuah kapal Dogolan satu set lengkap dengan mesin dan jaring (*semi trawl*) mencapai Rp. 80 juta.

Harga umum kapal sederhana di Bondet adalah sebagai berikut:

- Perahu sederhana Kualitas I (usia teknis 8 tahun): Rp. 10 juta/buah
- Perahu sederhana Kualitas II (usia teknis 5 tahun): Rp. 7 juta/buah
- Perahu sederhana Kualitas III(usia teknis 4 tahun): Rp. 5 juta/buah

Menurut seorang nelayan kawakan di Bondet yang telah berusia 54 tahun, modal melaut satu buah perahu minimum Rp. 18 juta dengan perincian sebagai berikut:

- Perahu Rp. 10,0 juta
 - Mesin ukuran 10 PK Merk “Ratna (baru) Rp. 3,0 juta¹⁰
 - Jaring 30 “ting-ting” (set) @ Rp. 120.000 Rp. 3,6 juta
 - Tenda Rp. 0,1 juta
- Jumlah: Rp. 116,6 juta

Perahu sederhana jenis ini berkemampuan melaut sampai 10 mil dari batas dari garis pantai. Kebutuhan jaring perahu ini tinggi karena sifat jaring yang relatif mudah rusak (maksimal satu tahun dengan perbaikan), juga karena sering terjadi ‘pencurian dan kehilangan’ jaring di laut. Kondisi semacam ini ikut mempengaruhi “ketergantungan pinjaman’ nelayan terhadap ‘bakul” (akan dijelaskan lebih rinci pada bab selanjutnya).

Satu tim kapal penangkap ikan biasanya terdiri dari 3 orang (disebut “anak bidak” atau “anak buah kapal”), masing-masing yaitu 1 orang Jantra (Juru Mudi yang biasanya adalah

¹⁰ Mesin ukuran sama ber merk “Kubota” seharga Rp. 7 juta. Setiap lima tahun sekali turun mesin dengan biaya servis sekitar Rp. 750 ribu.

“Juragan” atau pemilik kapal), 1 orang Juru Mesin, dan 1 orang Pelempar Jaring. Kapal biasanya mulai berangkat melaut sekitar pukul 03:00 dinihari dan kembali mendarat pukul 04:00 sore. Setiap kali melaut dibutuhkan biaya untuk bahan bakar, bahan makanan dan rokok sebesar Rp. 19.000. Atau bila mereka menghemat sebesar Rp. 15.000.

Setelah dikurangi dengan biaya melaut, hasil penjualan tangkapan dibagi dalam lima bagian dengan pembagian sebagai berikut: 2 bagian untuk pemilik kapal (termasuk Jaring dan mesin), 1 bagian untuk Jantra (Juru Mudi), 1 bagian untuk Juru Mesin, 1 bagian untuk Pelempar Jaring. Karena Juru Mudi biasanya adalah juga “Juragan” atau pemilik kapal, maka ia memperoleh tiga bagian.

Sebagai ilustrasi (lihat Box 1) penghasilan seorang nelayan kawakan bersama kawan-kawannya ketika hasil tangkapan dianggap tidak begitu bagus (satu bagian) hanya Rp. 12.000. Sedangkan pada kondisi tangkapan bagus, hasil yang diperoleh dapat mencapai lebih dari tiga kali lipat dari jumlah tersebut. (Lihat Box 2: Profil hasil tangkapan Pak M, nelayan lain di Desa Bondet).

Box 1.	
Penghasilan dari hasil tangkapan yang ‘tidak bagus’	
Pak K dan kawannya hari itu hanya berhasil menangkap:	
• Ikan Kembung 10 kg @ Rp. 3.500	Rp. 35.000
• Ikan Celanget 15 kg @ Rp. 1.200	Rp. 18.000
• Ikan Lajan 5 kg @ Rp. 5.000	Rp. <u>25.000</u>
Jumlah hasil jual	Rp. 78.000
Biaya melaut	Rp. <u>15.000 -</u>
Hasil bersih	Rp. 63.000
Hasil per satu bagian diperoleh dari Rp. 63.000 dibagi 5 atau sekitar Rp. 12.000. Pada kasus seperti ini, kadang-kadang Pak K memberikan Rp. 15.000 per orang kepada awak kapalnya. Menurut Pak K, ia masih lebih beruntung dari yang lain karena ia sebagai pemilik kapal dan sekaligus ikut melaut mendapat bagian yang lebih besar.	

Berbeda dengan sistem bagi hasil penangkapan rajungan, pihak pemilik kapal biasanya memperoleh 20% dari hasil penjualan rajungan. Hal ini karena jaring yang dipergunakan disediakan oleh pihak nelayan, bukan pemilik kapal. Pemilik kapal hanya sebagai “penyedia jasa angkutan”, dan si nelayan pemilik jaring sebagai “penumpang”.

Apabila dalam satu bulan rata-rata melaut 20 kali maka diperkirakan penerimaan nelayan adalah 20 x Rp. 54.000 atau sekitar Rp. 1,08 juta per bulan (lihat Box 2). Berdasarkan perkiraan rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga nelayan Rp. 20,000 per hari atau Rp. 600 ribu per bulan, maka terdapat ‘*excess liquidity*’ sebagai ‘*potential saving*’ atau ‘*repayment capacity*’ sekitar Rp. 400 ribu per bulan¹¹. Bila hal ini dikaitkan dengan kemampuan membayar kredit, dengan pertimbangan bahwa kemampuan tersebut tidak merata setiap bulan dalam sepanjang tahun, maka para nelayan tetap lebih menyukai pola pinjaman musiman. Perlu diperhatikan bahwa dalam satu tahun musim laut terdapat empat bulan dengan produksi rendah).

¹¹Bandingkan kelak dengan angka rata-rata household survey 20 + 20 responden yang sedang dipersiapkan.

Dengan mempertimbangkan pola produksi di atas, pada dasarnya para nelayan sangat membutuhkan skema pinjaman musiman dengan jangka waktu satu tahun dengan angsuran sebanyak tujuh kali dalam satu tahun. Artinya pada waktu musim paceklik tidak dikenakan kewajiban mengangsur (*seasonal loan with grace period*).

Box 2.			
Hasil rata-rata tangkapan ikan Pak M, seorang nelayan di Bondet (40 kali melaut pada tahun 1999)			
Tanggal Melaut	Hasil Kotor (Rp)	Potongan TPI (Rp)	Hasil Bersih (Rp)
27-Mar	40.455	2.000	38.455
9-Apr	54.033	4.000	50.033
14-Apr	84.355	4.000	80.355
16-Apr	146.010	6.000	140.010
17-Apr	54.870	4.500	50.370
11-May	39.525	5.000	34.525
12-May	26.505	4.000	22.505
17-May	57.500	5.000	52.500
22-Jun	94.395	8.000	86.395
23-Jun	47.430	7.000	40.430
25-Jun	103.230	5.000	98.230
26-Jun	37.200	3.000	34.200
27-Jun	63.147	5.000	58.147
9-Jul	133.920	10.080	123.840
10-Jul	85.560	10.000	75.560
20-Jul	65.100	5.000	60.100
23-Jul	75.795	5.000	70.795
24-Jul	49.383	4.500	44.883
29-Jul	37.100	2.597	34.503
30-Jul	51.440	3.000	48.440
9-Aug	67.890	4.300	63.590
10-Aug	74.980	3.500	71.480
11-Aug	34.040	2.000	32.040
12-Aug	39.560	1.560	38.000
20-Aug	37.260	2.000	35.260
22-Aug	35.512	2.000	33.512
23-Aug	35.156	2.000	33.156
27-Aug	55.844	5.300	50.544
28-Aug	34.000	2.770	31.230
3-Sep	67.804	3.800	64.004
4-Sep	46.450	3.460	42.990
8-Oct	32.200	2.000	30.200
9-Oct	32.200	2.200	30.000
10-Oct	96.600	4.000	92.600
12-Oct	54.648	4.648	50.000
13-Oct	53.452	3.452	50.000
15-Oct	36.984	2.484	34.500
16-Oct	34.500	2.000	32.500
17-Oct	18.860	5.000	13.860
18-Oct	34.132	2.132	32.000
19-Oct	46.000	4.000	42.000
Jumlah	2.315.025	167.283	2.147.742
Rata-rata/melaut	57.875	4.182	53.693

Desa Buyut

Desa Buyut dikenal sebagai desa pertanian di wilayah Kecamatan Cirebon Utara. Sebagai area pertanian, Desa Buyut yang luasnya 153,5 hektar memiliki lebih dari 103 hektar sawah, terdiri dari 48,1 hektar sawah dengan irigasi teknis; 31,3 hektar dengan irigasi setengah teknis dan 24,3 hektar dengan irigasi sedang.

Pada tahun 1999, jumlah penduduk Desa Buyut telah mencapai 5.399 jiwa yang terdiri dari 1.282 KK. Sekitar 135 KK termasuk KPS dan KS1, sebagian besar buruh dan pembuat sapu lidi. Dari sekitar 1767 orang yang bekerja, 527 orang (29%) bermata pencaharian sebagai petani dan 534 (30%) orang sebagai buruh tani. Lebih dari 70 pemuda dari Desa Buyut menjadi anggota militer (marinir) di Jakarta dan Surabaya. Tingkat kesadaran pendidikan di kalangan pemuda dan kondisi fisik yang baik memungkinkan mereka memenuhi syarat untuk menjadi anggota militer.

Terbatasnya pemilikan lahan pertanian telah mendorong banyak penduduk bekerja di sektor swasta (438 jiwa atau sekitar 25%), kebanyakan sebagai pekerja buruh industri rotan yang pada masa krisis semakin berkembang di Cirebon. Meskipun tidak memiliki tanaman rotan, Cirebon dikenal mampu memproduksi kerajinan rotan dengan mutu tinggi (bahan baku rotan didatangkan dari luar daerah seperti Kalimantan dan Sulawesi). Hasil industri rotan kebanyakan merupakan produk ekspor keluar negeri yaitu ke negara-negara Amerika Utara, Eropa dan Jepang. Mata pencaharian penduduk lainnya adalah sebagai karyawan swasta (Pertamina, Telkom, dll), wiraswasta (pemilik warung makanan, usaha serabi, toko pertanian, furniture, sub kontrak rotan, penggilingan padi, dll), PNS (guru, dll), dan pamong desa.

Pengairan setengah teknis telah menyebabkan kegiatan usaha tani di Desa Buyut dengan pola padi sawah dengan dua kali tanam. Pada musim kemarau umumnya petani tidak dapat bersawah atau lebih sering disebut sebagai 'musim paceklik'. Meskipun terdapat tanaman palawija atau sayuran (buah bonteng/ketimun dan semangka), luas lahan tanamnya sangatlah sedikit. Secara umum, kegiatan usaha padi sawah petani di Desa Buyut sebagai berikut:

Tabel 3. Pola Usahatani Padi Sawah di Desa Buyut

Bulan	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
Pola Tanam	Musim Gadu		<i>Panen</i>		Masa Bero ¹²		Musim Hujan		<i>Panen</i>		Musim Gadu	

Pada masa panen raya harga gabah pada umumnya merosot. Meskipun demikian, pola jual hasil panen masyarakat di Desa Buyut ternyata tidak langsung menjual setelah panen, melainkan mereka hasil panen dibawa pulang ke rumah dan dijual sedikit demi sedikit

¹² 'Masa Bero' adalah masa ketika tanah diistirahatkan/tidak ditanami karena tidak ada air. Pada dasarnya masa ini justru positif sebagai pemutus siklus berkembangnya hama tanaman (insect dan tikus). Namun adanya waktu tanam yang tidak seragam di kalangan petani telah mengakibatkan tidak berjalannya 'pemotongan siklus' alamiah tersebut; pada gilirannya sering mengakibatkan terjadinya gagal panen (puso).

sesuai dengan kebutuhan uang tunai¹³. Kebiasaan ini nampaknya cukup membantu petani di Desa Buyut untuk menunggu menjual hasil panennya pada waktu harga membaik, biasanya dua bulan setelah dan sebelum panen raya. Meskipun demikian, tidak dapat dihindari adanya penjualan dalam jumlah cukup besar dalam jangka waktu tidak terlalu lama dari masa panen. Penjualan terpaksa dilakukan, khususnya ketika petani harus memenuhi kebutuhan biaya persiapan garap untuk musim tanam berikutnya. Kondisi semacam ini sering dipergunakan sebagai alasan rational oleh petani untuk tidak melunasi langsung KUT yang diambilnya; terlebih lagi bila hasil panen pada masa pengembalian kredit kurang bagus atau gagal panen. Alasan semacam ini juga mempengaruhi petani untuk lebih menginginkan pola kredit pertanian yang memberikan fasilitas tiga kali angsuran. Pola ini lebih memberikan kesempatan bagi petani mampu untuk memenuhi biaya garap berikutnya, sehingga pada musim panen berikutnya mampu melunasi kredit (*seasonal loan with grace period*).

- *Angsuran Pertama*, 25% dari hasil panen Musim Hujan karena petani peminjam masih membutuhkan dana modal MT Musim Gadu.
- *Angsuran Kedua*, 50% dari hasil panen Musim Gadu karena petani peminjam masih membutuhkan dana modal tanam untuk Musim Hujan berikutnya, tetapi sudah memiliki sisa dana yang lebih cukup.
- *Angsuran Ketiga*, 25% dari hasil panen Musim Hujan berikutnya. Pada tahap ini petani telah mampu melunasi hutangnya, sekaligus lebih mampu mencukupi kebutuhan modal tanam musim berikutnya.

Tabel 4. Pola Usahatani di Desa Buyut dalam 5 Musim Tanam Terakhir (petani masih merasa berat mengembalikan pinjaman KUT MH 98/99)

Musim Tanam	MH 98/99	MG 99/00	MK 99/00	MH 99/00	MG 99/00
Peluang	Gagal Panen (Puso) dan Rugi	Agak baik	Bero	Panen Berhasil Baik	Bila Panen Berhasil lagi dengan baik, petani bisa bayar hutang

MH: Musim Hujan.; **MK:** Musim Kemarau; **MG:** Musim Gadu.

Box 3, 4, dan 5 berikut ini adalah contoh beberapa pola usaha petani sawah dalam satu musim tanam.

Berdasarkan informasi para petani, di wilayah Desa Buyut (dan daerah pantura lainnya), hama tikus yang hampir selalu menyerang terutama di musim kemarau. Dua tahun terakhir ini, panen padi dapat dikatakan hampir tidak ada hasil. Hanya beberapa petani yang beruntung mendapatkan hasil. Menurut seorang ketua kelompok tani, panen 1998-1999 'puso' karena virus, tanaman menjadi kerdil dan tidak berbuah. Diperkirakan pada tahun 2000 ini hanya akan mendapatkan hasil setengah (50%). Beberapa warga masyarakat mengatakan, penyebab hama ini karena petani tidak kompak dalam

¹³ Pola tradisional ini adalah warisan leluhur sehingga '*pamal?*' (bahasa Sunda) bila dilanggar. Pola ini sudah tidak dilakukan oleh banyak petani di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang sekaligus menjual padinya semasa masih di sawah ('sistim tebasan').

menggunakan jenis padi yang ditanam. Jenis yang dianjurkan adalah 'Digul' dan R64, namun petani kadang menanam 'Cisedane'.

Berdasarkan catatan pemilik satu-satunya toko pertanian di desa ini yang lokasi tokonya terletak tidak jauh dari kantor desa dan dipinggir jalan utama desa, (kebetulan ia juga ketua kelompok tani) banyak petani anggota kelompoknya telah mengambil pupuk dan obat tetapi belum membayar ('ngebon'¹⁴) dan akan dibayar setelah panen. Ternyata banyak yang belum membayar karena 'sawahnya tidak hasil'. Dalam catatannya terdapat petani yang masih memiliki hutang hingga Rp. 2,7 juta. Diperkirakan 1 ha sawah membutuhkan biaya sekitar Rp. 1 juta – Rp. 1,5 juta.

Box 3. Biaya Usaha Tani <u>Pemilik</u>, Pak S (50 Tahun) MTMH 98/99, Luas lahan 0,5 Ha.	
Jenis Biaya	Rupiah
Sewa traktor per ha	125.000
Upah tanam	90.000
Bibit 1 pack	15.000
Upah sebar bibit	25.000
Upah tenaga gawe (pacul) *	150.000
Upah tenaga galeng *	150.000
Pupuk Urea untuk bibit 10 kg	12.000
Obat Regent 1 kaleng	17.000
Cabut bibit 2 orang a Rp. 22.500	45.000
Pupuk TSP 75 kg	100.000
Pupuk Urea 125 kg	125.000
Pupuk KCL 25 kg	55.000
Ngoyos/Ngrambet/Semai I 10 orang @ Rp. 7.000	70.000
Ngoyos/Ngrambet/Semai II 5 orang @ Rp. 7.000	35.000
Urea II 50 kg	50.000
Semprot obat "Desis" 0,5 liter	71.000
Upah tenaga semprot 2 orang @ Rp. 15.000	30.000
Total Biaya :	1.165.000
Panen bersih (setelah Bawon) 15 Kwintal	
@ Rp. 100.000	1.500.000
Hasil bersih satu kali musim tanam :	335.000

Catatan: * Bahasa Jawa

** Bahasa Jawa, artinya tenaga membuat saluran air di antara petak sawah

¹⁴ Istilah dalam bahasa Jawa untuk mengambil barang terlebih dahulu dan membayar kemudian bila telah menghasilkan

Box 4.	
Biaya Usaha Tani <u>Penyewa</u>, Pak K (51 tahun)	
MT MH 1999/2000, luas tanam 1 hektar	
Jenis Biaya	Rupiah
Sewa traktor per ha	175.000
Upah tanam (sendiri)	-
Bibit 15 kg	45.000
Upah sebar bibit (sendiri)	-
Upah tandur (sistim borongan)	120.000
Upah tenaga galeng	60.000
Pupuk Urea 6 karung (3 Kwintal) @ Rp. 45.000	12.000
Obat/Insektisida Bayer 3 kaleng @Rp. 26.000	78.000
Upah tenaga penyemprot 3 orang @ Rp. 20.000	60.000
Cabut bibit 2 orang a Rp. 22.500	45.000
Pupuk II 4 karung TSP	180.000
Pupuk Urea 125 kg	125.000
Tenaga pupuk 7 orang @ Rp. 7.500	52.500
Ngoyos/Ngrambet/Semai I 20 orang @ Rp. 7.500	150.000
Ngoyos/Ngrambet/Semai II 15 orang @ Rp. 7.500	112.500
Urea II 50 kg	50.000
Plastik pembibitan 3 kg @Rp. 12.000	26.000
Sewa sawah	600.000
Total Biaya :	1.891.000
Panen bersih 2,4 ton @ Rp. 140.000	3.360.000
Hasil bersih satu kali musim tanam :	1.469.000

Harga sarana produksi pertanian (saprotan) akhir-akhir ini mengalami kenaikan yang menurut petani tidak wajar, apalagi dibandingkan dengan hasil panen (lihat Tabel 5). Beberapa petani menduga bahwa penggunaan obat yang berkurang telah menyebabkan adanya serangan hama atau virus.

Ongkos buruh penggarap pada saat penelitian sekitar Rp. 15.000/hari (jam 7 pagi s/d 4 sore) bersih atau Rp. 12.500 '*se-bedug*' (s/d jam 12:00 siang). Ongkos *matun* (tanam) oleh ibu-ibu sekitar Rp. 6.000 per orang *se-bedug*. Sebagai perbandingan buruh pabrik rotan mendapat Rp. 7.000 per hari, dan apabila borongan sekitar Rp. 30.000 per borongan. Adapun biaya traktor sekitar Rp. 200.000 per ha.

Box 5.	
Biaya Usaha Tani Penyewa, Pak S (58 tahun)	
MTMH 1999/2000, luas lahan 1 hektar	
Jenis Biaya	Rupiah
Sewa Traktor per ha	190.000
Upah galeng, 4 org @ 20.000	80.000
Cabut bibit 7 orang @ Rp. 20.000	140.000
Bibit Jenis Digul 15 K5 (3 zak) @ Rp. 7.000	21.000
Pembibitan dikerjakan sendiri	-
Tanam borongan (23 orang)	180.000
Biaya makan dan lauk pauk	17.400
Pupuk Urea 4 kwintal @ Rp. 100.000	400.000
Obat Furadan 6 pack @ Rp. 15.000	90.000
Obat Insektisida Bayer 2 kaleng @ Rp. 28.000	56.000
NPK 20 kg @ Rp. 2.500	50.000
Nglindak * 5 orang @ Rp. 20.000	100.000
Ngoyos (Daud)** 17 org @ Rp. 5.000	85.000
Biaya makan dan lauk pauk	11.200
Tenaga pupuk 1 laki-laki Rp. 20.000	20.000
Tenaga pupuk 7 perempuan Rp. 5.000	35.000
Babak galeng 1 orang 2 hari	40.000
Tenaga pupuk II 2 orang @ Rp. 20.000	40.000
Pupuk Urea 2,5 kwintal @ Rp. 100.000	250.000
Sewa tangki semprot	3.000
Ngoyos II (Daud) **12 org @ Rp. 5.000	60.000
Biaya makan dan lauk pauk	7.000
Obat tikus Klerat (patungan d/petani lain)	15.000
Sewa sawah	600.000
Total Biaya :	2.490.600
Panen bersih 4 ton @ Rp. 100.000/kw	4.000.000
Hasil bersih satu kali musim tanam :	1.509.400

Catatan: * Nglindak, perawatan tanah dan pencabutan gulma dengan menggunakan alat

** Ngoyos (Daud), pencabutan gulma secara manual

Tabel 5. Perubahan Harga Beberapa Sarana Produksi Pertanian (saprotan) yang dinilai petani sebagai tidak wajar

<i>Jenis Saprotan</i>	Harga Eceran pada tingkat petani tahun tanam MH 1998/99	Harga Eceran pada tingkat petani tahun tanam MH 1999/00
Urea	Rp. 58.000/Kwintal	Rp. 100.000/Kwintal
TSP	Rp. 63.000/Kwintal	Rp. 130.000/Kwintal
KCL	Rp. 80.000/Kwintal	Rp. 160.000/Kwintal
NPK	Rp. 100.000/Kwintal	Rp. 300.000/Kwintal
Bazadin	Rp. 6.000/0,5 liter	Rp. 24.000/0,5 liter

MH: Musim Hujan

Seluruh tanah sawah yang terdapat di desa diikutsertakan untuk mendapatkan KUT (termasuk tanah *bengkok*) yang dibagi dalam 4 kelompok, yaitu (1) kelompok RW 04; (2) kelompok RW 05; (3) kelompok RW 06; dan (4) kelompok RW 07. Ketua Kelompok Mekar RW 06 yang sempat ditemui Tim SMERU menyatakan bahwa anggota kelompoknya sekitar 56 orang – setengahnya adalah buruh.

Berkaitan dengan budaya setempat, hajatan (sunatan dan pernikahan) dengan mengundang tetangga, tetap menjadi tradisi, bahkan selama 'krismon'. Ketika Tim SMERU mengunjungi Kantor Desa sempat menyaksikan seorang anak 'bak raja' menunggang kuda yang dihias diiringi musik dan para undangan. Berdasarkan informasi seorang aktivis Posyandu, biaya sunatan sekitar Rp. 5 juta termasuk untuk hidangan, keliling dengan musik dan menunggang kuda. Namun biaya ini dapat tertutupi dari sumbangan warga yang memberikan antara Rp. 5.000 – Rp. 10.000 atau 5 kg beras. Pengalaman beberapa orang menunjukkan pengundang justru memperoleh keuntungan – bahkan ada yang dapat membangun dapur - setelah hajatan. Modal selain diperoleh dari saudara, juga berasal dari pedagang daging, dll. yang baru dibayar setelah hajatan selesai. Demikian juga pesta pernikahan.

Gotong-royong masih berlangsung dengan sangat baik, khususnya dalam pembangunan rumah. Tetangga saling membantu tanpa diberi upah. Apabila tetangga berhalangan justru memberi uang kepada warga yang membangun rumah sebagai pengganti tenaganya. Karena dikerjakan secara gotong royong – kadang sampai 50 orang, dalam satu minggu rumah sudah berdiri. Di masa 'krismon', hal ini tetap berlangsung.

Berdasarkan pengamatan Tim SMERU di lapangan, Desa Buyut tampak dinamis. Tidak banyak pemuda/pemudi menganggur, sebagian besar bekerja sebagai buruh rotan (swasta) di Tegal Wangi. Sekitar 200 orang bekerja di pabrik rotan. Beberapa usaha yang nampak berkembang antara lain penggilingan padi (terdapat 5, tetapi tinggal 3 yang aktif), sub kontrak rotan, pedagang serabi, warung makanan di pinggir sungai, bengkel, furniture (2), toko pertanian (1), warung kelontong (3).

2.3 Dinamika Ekonomi Masyarakat Selama Krisis Ekonomi

Di kalangan masyarakat lapisan bawah di perdesaaan, istilah 'krisis ekonomi' secara salah telah ditafsirkan secara sederhana sebagai situasi harga-harga barang kebutuhan sehari-hari yang 'berubah' menjadi mahal. Meskipun demikian, dengan nada 'sentimentil' mereka menyatakan bingung ketika mengamati kehidupan di kota, terutama di pusat-pusat perbelanjaan, mall atau kompleks pertokoan/ perdagangan yang selalu ramai dikunjungi orang berbelanja. Kehidupan perekonomian yang sejak lama dirasakan sebagai tidak pernah berubah dan selalu miskin (*stagnant miskin*) telah menyebabkan mereka sudah tidak mampu lagi membedakan derajat kesusahan kehidupan dirinya sendiri sebelum dan selama periode krisis ekonomi (1997 s/d 2000).

Khusus di kalangan komunitas nelayan di Desa Mertasinga, istilah "krisis" sudah menjadi terminologi komunikasi umum yang dipakai sehari-hari yang bermakna sebagai 'laut sedang sepi' atau "hasil tangkapan ikan di laut sedikit". Dari sisi makna teknis dan akademis penggunaan terminologi tersebut mungkin sudah bergeser jauh, namun popularitas istilah tersebut memberi indikasi bahwa "situasi krisis ekonomi dan moneter" hanya sekedar berita dari luar yang tidak dirasakan mempunyai dampak langsung bagi

kehidupan mereka. Penduduk mengarungi bahtera kehidupan secara rutin seiring dengan berlalunya musim dan pasang surutnya gelombang laut yang selalu dilawan dengan perahu-perahu kecil. Karakteristik dan pola pendapatan nelayan yang relatif kecil dan tidak teratur (*irregular income society*) - karena sangat tergantung pada (musim) laut – telah ikut mempengaruhi kecilnya akses terhadap fasilitas permodalan dari lembaga keuangan formal dan perbankan. Kondisi ini telah menciptakan ketergantungan masyarakat ini kepada pelepas uang dengan tingkat bunga yang relatif sangat tinggi. Demikian pula halnya dengan para pemilik perahu atau “juragan”¹⁵. Mereka pada umumnya juga masih terikat pinjaman pada bakul kecil ‘pemilik uang’. Para bakul tersebut kebanyakan adalah tetangga sendiri atau warga dari desanya sendiri. Dalam menjalankan usahanya, beberapa bakul di desa memang telah menggunakan modal sendiri dan/atau mampu mempunyai akses permodalan ke lembaga keuangan dan perbankan formal seperti Badan Kredit Desa (BKD) di tingkat desa dan Bank Rakyat Indonesia atau BRI Unit di kecamatan. Meskipun demikian, permodalan sebagian besar para bakul di desa ternyata juga masih terikat oleh para tengkulak atau pengusaha di desa. Profil para tengkulak itulah yang dapat disebut sebagai “pengusaha” desa (*local entrepreneurs*). Mereka pada umumnya sebagai pengusaha hasil laut, seperti industri pengupasan rajungan dan kerang. Namun, para pengusaha desa ini pada dasarnya juga terikat pada jejaring (*networking*) pengusaha besar dan/atau eksportir yang semuanya berasal dan berdomisili di luar kota seperti Jakarta, Pemalang, Bandar Lampung.

Sedangkan di kalangan masyarakat tani di Desa Buyut, ‘krismon’ ditafsirkan sebagai situasi paceklik (gagal panen). Kondisi paceklik tersebut dirasakan semakin berat karena harga sarana produksi pertanian (saprota) yang harus dipenuhi dalam melaksanakan usaha tani semakin mahal. Kenaikan harga saprota tersebut dinilai sangat drastis bila dibandingkan dengan harga sebelumnya, sehingga ‘krismon’ lebih tepat disebut sebagai “berubah naiknya harga saprota”. Kenaikan harga saprota tersebut dinilai sangat tidak wajar karena tidak sebanding dengan nilai tukar di tingkat petani dimana harga jual hasil pertanian sangat rendah. Sebagai contoh, harga satu kwintal urea sama dengan satu kwintal padi gabah kering giling (GKG). Bahkan pada saat panen raya, harga jual padi semakin merosot di bawah harga pupuk urea. Harga jual padi GKG Rp. 98.000/kwintal pada musim panen raya MH 99/00, tetapi setelah panen raya mencapai Rp. 140.000/kwintal. Tingkat harga ini sangat dipengaruhi oleh operasi pasar yang dilakukan oleh Kantor Dolog setempat.

III. KREDIT PERDESAAN, AKSES DAN PILIHAN MASYARAKAT

3.1 Skema Kredit Perdesaan

3.1.1 Kredit Formal

Ruang lingkup kredit formal yang dimaksudkan dalam studi ini adalah kredit yang disediakan oleh lembaga keuangan dan perbankan yang bersifat primer maupun sekunder dan berbadan hukum serta beroperasi sampai di tingkat desa (sampel). Lembaga-lembaga

¹⁵ Istilah lokal di Desa Mertasinga dan Kabupaten Cirebon pemilik perahu disebut sebagai “juragan”, sedangkan nelayan bukan pemilik perahu disebut sebagai “bidak” atau anak buah kapal. Terminologi ini sangat berbeda dengan istilah “Juragan” di beberapa daerah lain di Jawa, khususnya di Jawa Tengah yang artinya kelompok pedagang mandiri yang bermodal cukup besar dan mempunyai banyak buruh atau pekerja.

itu antara lain: Bank Rakyat Indonesia *c.q.* BRI Unit, Badan Perkreditan Rakyat (BPR), Badan Kredit Desa, maupun lembaga koperasi.

1. Bank Rakyat Indonesia (BRI Unit)

Sebagai sebuah *business entity*, BRI merupakan sebuah lembaga keuangan bank primer (*primary bank*) yang dimiliki Pemerintah Indonesia dan telah berdiri sejak tahun 1895. BRI mempunyai Kantor Pusat di Jakarta dan 12 Kantor Wilayah, 318 Kantor Cabang dan 3.705 Kantor BRI Unit Desa (BRI Unit) yang tersebar di seluruh tanah air.

Secara operasional, sebuah BRI Unit dikelola paling tidak oleh lima orang staff pelaksana yang semuanya berstatus sebagai pegawai organik BRI. Para pelaksana tersebut terdiri dari: seorang Pimpinan Unit yang sering disebut sebagai Kepala Unit, seorang Mantri yang bertindak sebagai "*Loan Officer*", seorang petugas Pemegang Kas (Kasir), seorang petugas Pembuku (*Book-keeper*), dan seorang petugas Satuan Pengamanan (Satpam atau penjaga malam).

Jumlah staf tersebut dapat ditambah sesuai dengan beban kerja (*work load*) dari Unit yang bersangkutan. Dan setiap penambahan staff selalu diperhitungkan berdasarkan "*benefit and cost ratio analyses*".

Wilayah Kecamatan Cirebon Utara dilayani oleh BRI Unit Klayan yang berlokasi di Desa Klayan. Secara operasional BRI Unit mempunyai wilayah kerja yang dibatasi secara paralel dengan batas administrasi pemerintahan kecamatan. Hal ini untuk menghindari adanya tumpang tindih pelayanan dari BRI Unit lain yang berdekatan dan terutama untuk menghindari terjadinya *double credit* pada nasabah yang sama¹⁶.

Secara umum, BRI Unit memang merupakan lembaga perbankan yang sangat populer dan diingini oleh banyak kalangan masyarakat perdesaan di Kecamatan Cirebon Utara; demikian pula halnya di Desa Mertasinga dan Desa Buyut. Namun penerapan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) oleh kalangan perbankan telah menyebabkan masih banyak masyarakat desa yang belum mempunyai akses pemenuhan kebutuhan fasilitas kredit ke BRI Unit Klayan. Dengan kata lain masih terdapat celah antara permintaan dan penawaran (*supply and demand gap*) di sektor fasilitas pinjaman. Kondisi '*gap*' semacam ini memang telah berlangsung jauh sebelum masa krisis ekonomi.

Meskipun milik pemerintah, BRI Unit adalah sebuah lembaga perbankan yang '*profit oriented*' yang menerapkan azas '*prudential banking*' dengan sistem bunga yang berlaku di pasar (*market rate of interest*). Secara operasional, BRI Unit mempunyai produk pinjaman maupun simpanan.

Kredit Umum Perdesaan (Kupedes) adalah produk unggulan BRI Unit yang dipasarkan dengan tingkat suku bunga sebesar 2% per bulan *flat rate*. Tingkat suku bunga *flat rate* ini bila sudah diperhitungkan dengan cadangan dana insentif pembayaran tepat waktu (*due date installment incentive*) akan berada pada kisaran 33 % per tahun. Jangka waktu pengembalian KUPEDDES adalah secara bulanan selama 12 s/d 18 bulan.

¹⁶ Dalam suatu kasus khusus, sebuah BRI Unit dapat melayani nasabah yang berdomisili di kecamatan lain. Hal ini dapat diberlakukan sejauh ada pengaturan khusus yang dikat dengan "ijin prinsip". Kasus ini biasanya berlaku pada nasabah lama yang pindah alamat.

Sedangkan untuk produk simpanan (*saving instrument*), BRI Unit memperkenalkan Simpanan Masyarakat Perdesaan (Simpedes) yang memberlakukan bunga progresif (*progressive interest rate*), yaitu sebagai berikut (per bulan Juli 2000):

- Saldo simpanan: Rp. 10.000 s/d Rp. 1 juta, suku bunga 6 % per tahun
- Saldo simpanan: Rp. 1 juta s/d Rp. 5 juta, suku bunga 8 % per tahun
- Saldo simpanan: Di atas Rp. 5 juta, suku bunga 9 % per tahun

Penampilan operasional BRI selama masa krisis di wilayah Cirebon dapat dilihat pada Tabel 6 dan Grafik 1, serta Tabel 7 dan Grafik 2 berikut ini.

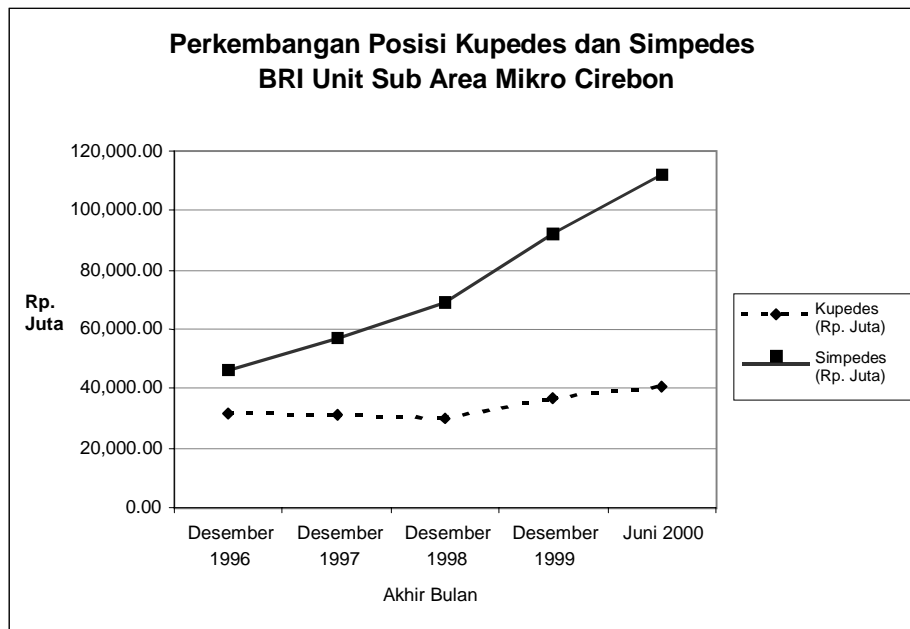
**Tabel 6. Rekapitulasi Posisi Pinjaman Kupedes dan Simpedes
BRI Unit Sub Area Mikro Cirebon**

Posisi Akhir bulan	Kupedes		Simpedes	
	(Rp. Juta)	(orang)	(Rp. Juta)	(orang)
Desember 1996	31.627,3	16.857	46.637,1	113.805
Desember 1997	31.243,2	16.392	56.921,3	132.621
Desember 1998	29.903,5	15.083	69.224,6	162.279
Desember 1999	36.582,7	14.855	92.286,0	185.237
Juni 2000	40.964,5	15.074	112.122,6	197.469

Sumber: Diolah dari data BRI Kantor Cabang Cirebon (Sub area mikro)

Catatan: Angka rupiah dibulatkan ke atas

Grafik 1.



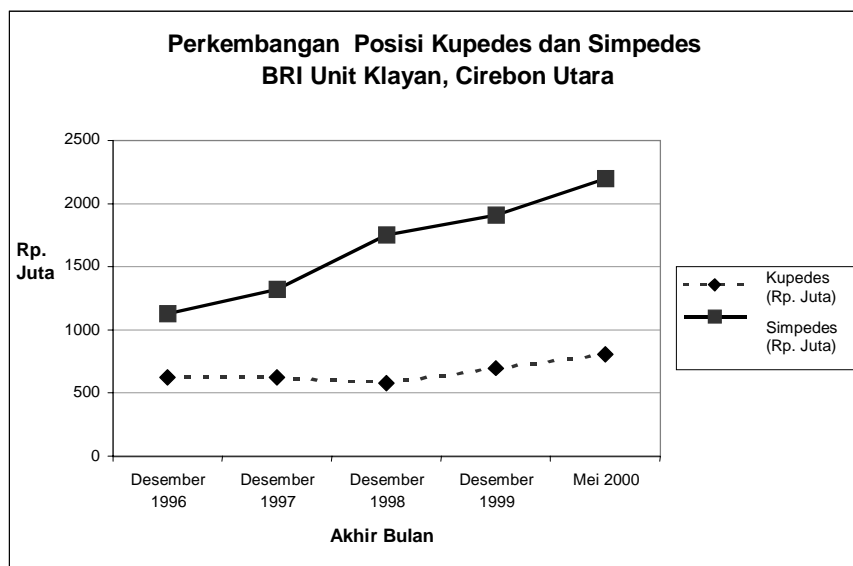
Tabel 7. Rekapitulasi Posisi Pinjaman Kupedes dan Simpedes BRI Unit Klayan, Kecamatan Cirebon Utara.

Posisi Akhir bulan	Kupedes		Simpedes	
	(Rp. Juta)	(orang)	(Rp. Juta)	(orang)
Desember 1996	626,4	451	1.132,6	3.300
Desember 1997	627,9	419	1.318,4	3.630
Desember 1998	579,9	366	1.750,5	4.178
Desember 1999	691,3	343	1.916,3	4.468
Mei 2000	806,1	342	2.976,2	4.604

Sumber: Diolah dari data BRI Unit Klayan, Kecamatan Cirebon Utara.

Catatan: Angka rupiah dibulatkan ke atas

Grafik 2:



Berdasarkan grafik perkembangan ekspansi Kupedes yang diberikan oleh BRI di atas, diperoleh gambaran bahwa ‘suasana krisis ekonomi’ memang dirasakan di wilayah Cirebon. Kondisi itu terutama terasakan pada tahun 1998 dimana terdapat penurunan dalam realisasi jumlah Kupedes. Meskipun demikian, dalam situasi krisis dimana ketika itu juga telah terjadi penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan swasta ternyata telah ikut mempengaruhi peningkatan tajam dalam perkembangan simpanan Simpedes di BRI Unit yang dikenal sebagai bank milik pemerintah. Posisi simpanan yang jauh melampaui posisi kredit tersebut seringkali disalahtafsirkan oleh banyak kalangan sebagai peristiwa terjadinya pelarian modal dari desa ke kota (*capital flight*)¹⁷.

¹⁷ Deregulasi Perbankan tahun 1983 yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia telah mengubah misi BRI Unit sebagai “profit center” yang sangat progresif dalam mengembangkan produk perbankan. Instrument simpanan SIMPEDES telah berhasil secara significant dalam memobilisasi dana masyarakat di daerah perDesaan, jauh melampaui jumlah kredit KUPEDES yang disalurkan di Desa. Keberhasilan tersebut sering kali dikritisi oleh berbagai pihak sebagai upaya penyedotan dana (*capital flight*) perDesaan ke kota. Kritik semacam itu menjadi lebih sensitif manakala diketahui bahwa banyak kredit yang disalurkan ke masyarakat perkotaan, terutama di kalangan ‘konglomerat’, malah mengalami kemacetan.

2. Badan Perkreditan Rakyat (BPR)

Badan Perkreditan Rakyat (BPR) secara legal termasuk *secondary financial institution*. BPR Klayan adalah satu-satunya BPR di wilayah Kecamatan Cirebon Utara. Secara kelembagaan BPR Klayan bernaung di bawah koordinasi dan pemilikan Pemda Kabupaten Cirebon (Badan Usaha Milik Daerah -BUMD). Direktur BPR Klayan adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dengan Surat Keputusan Bupati. Direktur dibantu oleh 8 orang staff pelaksana yang bukan PNS, masing-masing yaitu: seorang Direktur (Pegawai Negeri Sipil), seorang Kepala Staf Umum, seorang Pembantu Kepala Staf Umum, seorang Satuan Pengawas Intern (SPI), seorang Kepala Bagian Kredit, seorang Pembantu Kepala Bagian Kredit, seorang Kepala Bagian Dana, seorang Pembantu Kepala Bagian Dana, seorang Kasir, dan seorang Petugas Pembuku.

Berbeda dengan operasi BRI Unit Klayan yang lebih berkonsentrasi di wilayah Kecamatan Cirebon Utara, BPR Klayan ternyata malah mempunyai wilayah operasi sangat luas, menjangkau kecamatan-kecamatan lain yang terdapat di wilayah Kabupaten Cirebon bagian utara. Hal ini dilakukan sebagai upaya memperluas pangsa pasar dan 'menampung' potensi permintaan calon peminjam dari kecamatan lain.

Tidak setiap kecamatan memiliki BPR aktif. Adanya persaingan dengan BRI Unit telah 'memaksa' BPR Klayan harus ekspansi keluar kecamatan. Perluasan wilayah operasional semacam ini merupakan salah satu indikator bahwa tingkat preferensi masyarakat untuk meminjam uang di BPR Klayan lebih rendah daripada di BRI Unit yang memang tampak lebih profesional dan terpercaya. Kecenderungan ini juga bisa dilihat dari keragaman usaha dan jumlah nasabah kedua bank ini. Misalnya: di Desa Mertasinga terdapat 36 nasabah peminjam Kupedes BRI sebaliknya hanya terdapat satu orang peminjam dari BPR Klayan padahal sebagai entitas bisnis, BPR Klayan juga mengeluarkan produk perbankan berupa pinjaman maupun simpanan yang keduanya mengikuti suku bunga pasar.

Hampir mirip dengan sikap '*over prudent*' di kalangan perbankan, persepsi negatif tentang pola pendapatan dan kehidupan petani maupun nelayan telah menyebabkan BPR Klayan juga lebih mengutamakan penyediaan pinjaman permodalan untuk melayani sektor perdagangan dan golongan berpenghasilan tetap dengan pola angsuran bulanan 12 bulan selama satu tahun¹⁸.

Dalam memberikan pinjaman, BPR Klayan juga memberlakukan simpanan wajib (*forced saving*) sebesar 2,5% yang dibekukan selama masa pinjaman. Tingkat suku bunga pinjaman 3% per bulan dengan perincian 2,5% sebagai fee dan 0,5 % untuk biaya asuransi. Pinjaman dapat diberikan dengan persyaratan adanya jaminan tambahan.

Untuk pinjaman dalam jumlah relatif kecil (di bawah Rp. 1 juta), diberlakukan sistim '*Fiducia*', yaitu dengan jaminan surat pemilikan barang, seperti Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Sedangkan untuk pinjaman di atas Rp. 3 juta - Rp. 5 juta, diperlukan pengikatan pinjaman melalui notaris dengan biaya tambahan Rp. 30 ribu. Pinjaman di atas Rp. 5 juta dikenakan biaya tambahan Rp. 55 ribu. Dari 335 jumlah nasabah peminjam di BPR Klayan terdapat sekitar 75 pinjaman yang diproses dengan Notaris.

¹⁸ Di dalam dunia perbankan di Indonesia populer dengan istilah 'golbertap' (*fixed income group*).

Besar pinjaman yang dapat diberikan oleh BPR Klayan berkisar antara Rp. 500 ribu - Rp. 10 juta atau rata-rata berkisar sebesar Rp. 2,5 juta. Sampai dengan akhir Mei 2000, keragaan usaha BPR Klayan adalah sebagai berikut:

- *Outstanding* pinjaman : Rp. 300 juta (335 orang)
- Posisi simpanan : Rp. 175 juta (1.990 orang)

Berbeda dengan posisi simpanan di BRI Klayan yang jauh melebihi posisi pinjaman, posisi simpanan BPR Klayan relatif masih kecil dan di bawah posisi *outstanding* pinjaman. Banyak nasabah penabung di BPR Klayan adalah anak-anak sekolah dengan jumlah tabungan relatif sangat kecil. Posisi simpanan ini juga merupakan salah satu indikator bahwa kepercayaan masyarakat perdesaan terhadap BPR masih rendah. Secara operasional, kondisi semacam ini tentu akan menambah beban biaya dana (*cost of fund*) BPR Klayan. Terlebih lagi bila dipertimbangkan bahwa sumber permodalan BPR Klayan berasal dari Bank Mandiri (ex Bank Exim) yang mengenakan tingkat suku bunga pasar sebesar 20% per tahun (pada tahun 1998 malah mencapai 30% per tahun).

3. Badan Kredit Desa (BKD)

Badan Kredit Desa (BKD) adalah badan usaha milik desa yang beroperasi di wilayah kerja desa yang bersangkutan dan dikelola sebagai perusahaan tersendiri dan terpisah dari kekayaan lain milik desa¹⁹. BKD pada dasarnya adalah sebuah lembaga keuangan di tingkat desa yang sudah sangat tua. BKD pertama kali didirikan pada tahun 1887 oleh De Wolff van Westerode. Saat ini, sesuai dengan peraturan perundangan perbankan, BKD termasuk lembaga bukan Bank Umum, tetapi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Misi utama pendirian BKD adalah sebagai berikut: (1) memberikan pelayanan kebutuhan kredit untuk usaha produktif di desa; (2) menciptakan pemerataan kesempatan berusaha; (3) membasmi dan mengurangi 'praktek ijon' dan 'renternir', (4) meningkatkan pendapatan masyarakat desa; (5) mendidik masyarakat desa membiasakan menabung dan mengenal perbankan; dan (6) mendorong peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat desa.

Secara operasional BKD hanya membuka pelayanan satu kali dalam seminggu. Sebagai contoh: BKD di Desa Mertasinga buka setiap hari Senin; di Desa Buyut pada hari Jumat. Pengelola BKD adalah warga desa sendiri yang dibantu oleh tenaga Juru Tata Usaha (JTU) dari BRI Kantor Cabang. JTU bertanggung jawab memberikan bantuan teknis dan administrasi. Satu orang petugas JTU melayani enam wilayah BKD. Pengelola dari desa terdiri dari *Komisi I*: Kepala Desa (*ex officio*²⁰), *Komisi II*: Perangkat Desa/Pemuka masyarakat, *Komisi III*: Perangkat Desa/Pemuka masyarakat.

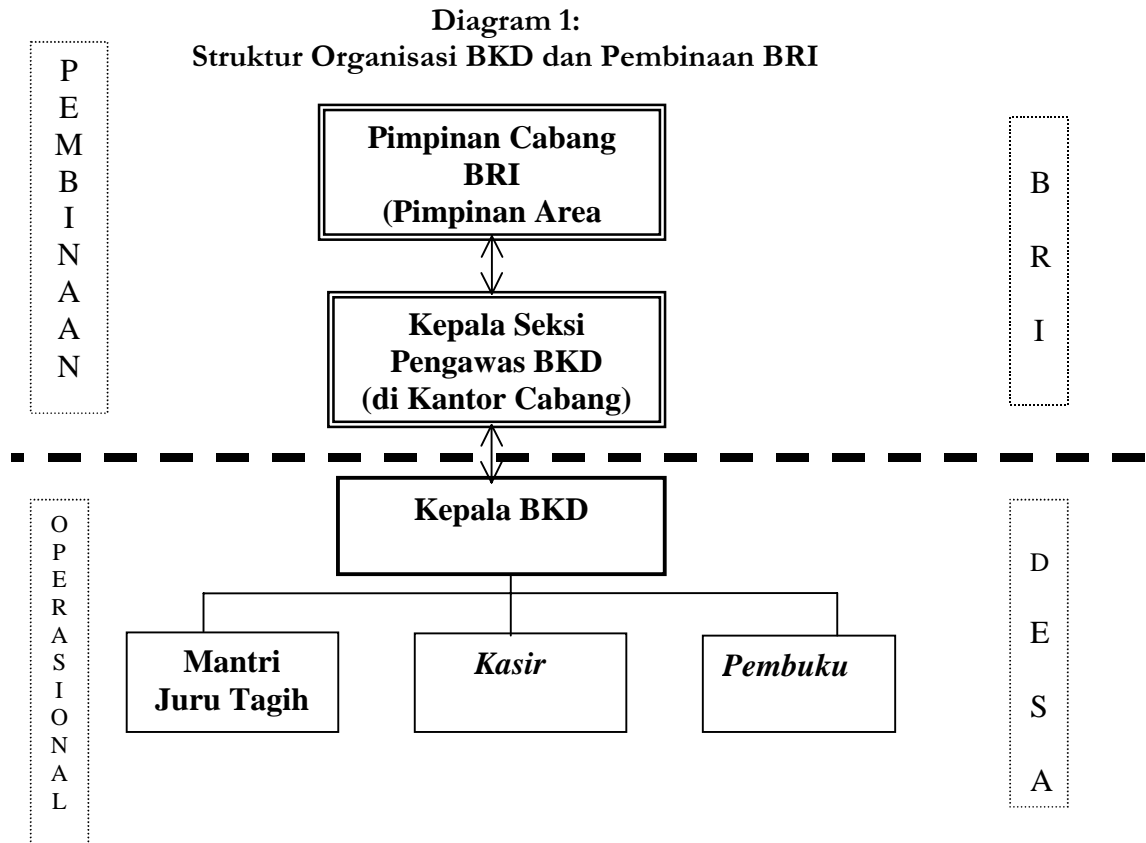
Biaya administratif pengelolaan BKD untuk gaji staf relatif rendah dan efisien (*low administration cost*), yaitu 3% dari angsuran yang diterima BKD. Sistem ini sekaligus juga mampu merangsang staf BKD agar bekerja lebih baik. Sedangkan gaji tenaga JTU dibayar oleh BRI sesuai dengan ketentuan yang berlaku²¹.

¹⁹ BKD hanya beroperasi di daerah Pulau Jawa. Untuk daerah di luar Pulau Jawa dikenal Tempat Pelayanan Simpan Pinjam (TPSP) yang secara kelembagaan dan operasional sama dengan BKD.

²⁰ Karena jabatan.

²¹ Petugas BKD di BRI bukan pegawai organik BRI, sistem penggajian mereka masih mengikuti ketentuan gaji Pegawai Nege ri Sipil. Contoh, gaji seorang JTU dimulai dari golongan IC.

Kedekatan hubungan dan saling kenal antara petugas pengelola BKD dengan masyarakat secara positif telah mampu membentuk suatu struktur hubungan kepercayaan dalam pemberian pinjaman modern. Dan karenanya, prosedur pemberian pinjaman di BKD dapat dilaksanakan secara sangat mudah, sederhana dan tidak mensyaratkan jaminan tambahan (*non collateral loan*).



Ada tiga model skema pelayanan pinjaman BKD, yaitu: mingguan, selapanan, dan musiman. Namun karena alasan keterbatasan permodalan, BKD lebih mengembangkan pola pinjaman mingguan dengan bunga 10% dan 10 kali angsuran, atau 2,5 bulan. Setiap pinjaman dikenakan simpanan wajib sebesar 10% yang dapat diambil setelah lunas (biasanya diberikan pada waktu Lebaran). Biaya administrasi Rp. 2.500 dan biaya buku Rp. 1.000²².

²² Satu buku dapat dipergunakan untuk lebih dari 10 kali pinjaman

Pola pinjaman BKD bagi peminjam baru dapat dicontohkan sebagai berikut;

Pokok pinjaman		Rp. 100.000
Potongan Biaya:		
1.	Bunga 10%	Rp. 10.000
2.	Tabungan Wajib	Rp. 10.000
3.	Biaya administrasi	Rp. 2.500
4.	Biaya Buku	Rp. <u>1.000 +</u>
		<u>Rp. 23.500</u>
Jumlah yang diterima pada saat realisasi kredit		Rp. 76.500

Angsuran 10 kali @ **Rp. 12.000/minggu**

Besar pinjaman yang dapat diberikan oleh BKD berkisar Rp. 100 ribu - Rp. 1 juta, dengan rata-rata Rp. 200 ribu (atau cicilan Rp. 24.000/minggu)²³. Namun demikian, karena alasan keterbatasan permodalan dan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) telah menyebabkan BKD belum mampu melayani seluruh potensi permintaan yang ada di desa.

Selama masa krisis ekonomi, perkembangan usaha BKD di wilayah Cirebon memang mengalami sedikit penurunan, demikian juga di Desa Buyut. Meskipun demikian, secara umum respon dan sikap masyarakat perdesaan terhadap pelayanan BKD cukup positif. Di Desa Mertasinga malah dapat meningkatkan jumlah pinjaman kepada masyarakat. Kendala utama yang dirasakan adalah terbatasnya modal yang dimiliki oleh BKD. Hal ini dapat dilihat dari ratio antara posisi outstanding pinjaman dan posisi Kas BKD (baik di Desa Mertasinga, Desa Buyut dan secara keseluruhan di Cirebon) yang menunjukkan jumlah yang memang sangat kecil, bahkan nyaris tidak ada sisa Kas yang cukup untuk dipinjamkan lagi kepada masyarakat (lihat Tabel. 8). Kondisi semacam ini memang dibenarkan oleh beberapa masyarakat yang diwawancarai sebagai sampel dan mengatakan bahwa BKD terpaksa menolak permohonan pinjaman karena “alasan tidak ada dana”.

Kenyataan di atas memberikan pelajaran penting bahwa BKD sangat potensial untuk dikembangkan sebagai lembaga keuangan di tingkat desa yang handal dan mampu memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan, sekaligus juga mampu memerangi praktek rentenir²⁴.

²³ Maksimum loan yang diperkenankan oleh BRI sebagai pembina BKD adalah Rp. 750 ribu. Namun dengan pertimbangan bahwa si peminjam betul-betul dapat dipercaya, BKD di Desa Mertasinga berani memberikan pinjaman sebesar Rp. 1 juta kepada 3 orang.

²⁴ “Bank Desa” (BKD) jauh lebih tua dibandingkan dengan “*Grameen Bank*” yang dikembangkan Professor Yunus dari Bangladesh. Adanya “era keterbukaan” akhir-akhir ini juga sudah merambah kedalam alam pemikiran dan sikap kesadaran masyarakat perDesaan di Indonesia merupakan ‘moment’ dan kesempatan yang sangat tepat bagi kebangkitan BKD sebagai lembaga keuangan yang professional di Desa (*reinventing professional rural financial market in Indonesia*). Hal ini bukan berarti bahwa BKD yang sekarang sudah pada tahap “sempurna”, tetapi BKD masih memerlukan beberapa pengembangan dalam sistem operasional dan pelayanan BKD di waktu yang akan datang.

**Tabel 8. Posisi Pinjaman, Kekayaan, Rugi/Laba, dan Posisi Kas BKD
(dalam juta Rupiah, dengan pembulatan ke atas)**

Wilayah Kerja	Pinjaman (oustanding)		Modal/ Kekayaan		Rugi/Laba		Posisi Kas	
	1998	1999	1998	1999	1998	1999	1998	1999
Ds. Mertasinga	14,3	18,6	6,9	8,3	1,5	2,5	0,360	0,128
Ds. Buyut	16,0	10,7	9,5	7,3	1,8	2,6	0,102	0,139
Cirebon	2.209,7	1.681,7	1.642,7	1.177,3	146,9	160,5	42,4	23,1

Sumber: Diolah dari Laporan Neraca Kantor BKD Ds.Mertasinga, Ds. Buyut dan Kantor Cabang BRI Cirebon selaku Badan Pengawas BKD

Potensi BKD semakin berkembang jika dipertimbangkan bahwa BKD secara operasional sebetulnya juga diperkenankan untuk mengelola pinjaman dalam bentuk Kredit Lapanan maupun Kredit Musiman dan Lumbung Padi. Pola yang terakhir ini sebetulnya sangat potensial untuk dikembangkan dalam melayani “Kredit Usaha Tani” secara lebih profesional di tingkat desa. Pengembangan BKD secara lebih profesional juga sangat mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan program mikro di sektor pertanian melalui “*corporate farming system*”²⁵.

4. Koperasi Unit Desa (KUD)²⁶

KUD Mina Waluyo di Desa Mertasinga (lebih dikenal sebagai KUD Bondet) lebih menekankan pelayanannya di sektor perikanan. Dalam operasinya (sejak tahun 1980) KUD Bondet telah menyalurkan kredit kepada para nelayan, dengan besar pinjaman antara Rp. 200 ribu - Rp. 1 juta per nelayan peminjam. Pembayaran cicilan pinjaman dilakukan dengan melakukan pemotongan terhadap hasil tangkapan ikan ketika dilelang di KUD. Setiap pinjaman dikenakan tingkat suku bunga sebesar 8% yang harus dilunasi sekitar 10 kali melaut (atau sekitar satu bulan), yaitu dengan perincian potongan biaya sebagai berikut:

- 2% untuk biaya operasional KUD
- 1% untuk administrasi KUD
- 1% untuk biaya pesta laut (satu tahun sekali)
- 1% simpanan wajib nelayan
- 1,3% untuk simpanan sukarela nelayan
- 0,7% untuk dana paceklik.

Sampai akhir Juni 2000 jumlah dana pinjaman KUD Bondet yang masih beredar di masyarakat mencapai Rp. 75 juta. Dari jumlah ini sekitar 70% adalah peminjam lancar (meskipun demikian, masih belum diperoleh keterangan jelas tentang perguliran dana ini, baik dari kalangan nelayan responden maupun pengurus KUD).

²⁵ Pernyataan Presiden KH Abdurrachman Wahid dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Departemen Pertanian, di Jakarta tanggal 28 Juli 2000 dan pernyataan Menteri Pertanian dalam artikel: “Tekankan Program Pertanian Mikro” (Harian *Kompas* 29 Juli 2000).

²⁶ Adanya keterbatasan waktu dan ‘sikap agak tertutup’ dari para pengurus KUD, telah menyebabkan Tim SMERU belum memperoleh banyak informasi rinci tentang pelaksanaan berbagai program yang ada di KUD Mina Waluyo di Bondet, maupun KUD lainnya di Cirebon. Perlu dilakukan kajian khusus lebih lanjut tentang dinamika dan permasalahan KUD.

➤ *KUD Mina sebagai pelaksana KUT*

Pada tahun 1992 KUD Mina Bondet telah ditunjuk oleh Kantor Departemen Koperasi di Cirebon untuk ikut menjadi ‘pengelola’ Kredit Usaha Tani (KUT) bagi seluruh KUD di wilayah Kecamatan Cirebon Utara. Hal ini karena adanya ‘berbagai permasalahan’ dengan pelaksanaan KUT oleh koperasi-koperasi KUD yang ada di wilayah Kecamatan Cirebon Utara. Peristiwa ini dikenal sebagai ‘amalgamasi KUD’ atau ‘penggabungan organisasi’ KUD agar KUT dapat tetap dilaksanakan di Cirebon Utara. Kebijakan ‘amalgamasi’ ini telah menyebabkan KUD Mina Waluyo di Desa Mertasinga -yang seharusnya lebih bergerak di sektor perikanan - kini juga ikut mengelola Kredit Usaha Tani (KUT) yang berada di wilayah Cirebon Utara (termasuk KUD “Kerti” Desa Buyut yang kini sudah tidak beroperasi lagi).

Persyaratan luas minimal sebuah KUD untuk dapat mengelola langsung pinjaman KUT adalah 2000 hektar. Karena alasan bahwa jumlah areal tanam KUT di wilayah Cirebon Utara hanya 875 hektar, maka dalam pengelolaan pinjaman KUT, KUD Bondet harus menginduk kepada KUD Jaga Bakti yang berada di Kecamatan Kapetakan yang mempunyai luas tanam lebih dari 2000 hektar. Dalam posisi semacam ini KUD Bondet tidak dapat berhubungan langsung dengan pihak BRI, sebaliknya, setiap pengambilan keputusan masih harus dikoordinasikan dengan KUD Jaga Bakti. Persoalan koordinasi – yang semakin panjang- ini diakui oleh pengurus KUD Mina di Bondet menjadi semakin kompleks dan “bikin pusing tujuh keliling’ ketika terjadi persoalan keterlambatan distribusi saprotan (pupuk dan obat-obatan) sebagai salah satu komponen paket KUT untuk musim tanam musim hujan 1998/99. Terlebih lagi ketika dalam penyelesaiannya juga melibatkan pihak PT. Pupuk Sriwijaya (Pusri) yang berada di kota Bandung. Keterlambatan tersebut telah menimbulkan protes keras berkepanjangan dari kalangan petani peminjam, yang akhirnya dapat diselesaikan secara kompromi dengan tidak memasukkan biaya saprotan sebagai komponen kredit KUT, sebaliknya malah dianggap sebagai cicilan awal pengembalian KUT oleh petani kepada BRI²⁷. Kompleksitas persoalan pelaksanaan KUT tersebut semakin dirasakan berat oleh pengurus KUD Bondet ketika banyak tunggakan KUT yang ternyata malah berada pada pengurus Kelompok KUT. Penyimpangan semacam ini disebabkan oleh dua hal: pertama, menahan setoran angsuran KUT yang sudah dibayar petani; kedua: ‘KUT fiktif’, yaitu banyak kredit KUT yang ternyata tidak dimanfaatkan langsung oleh penggarap melainkan oleh pengurus Kelompok Tani dan/atau oleh oknum pamong desa yang ‘numpang nama’ tetapi tidak memiliki garapan sawah sendiri. Penggarap yang sesungguhnya justru tidak memperoleh KUT.²⁸

Menurut pengamatan Ketua Pengurus KUD di Bondet, pengelolaan kredit usaha tani secara individual dengan sistim perbankan yang profesional dimungkinkan untuk berjalan lebih baik daripada dengan sistim kelompok seperti sekarang ini. Sistim individual melalui perbankan seyogyanya menerapkan persyaratan prosedur secara sederhana.

²⁷ Sistim administrasi pengelolaan KUT yang sangat kompleks tersebut ‘diduga’ telah ikut menyebabkan kegagalan pelaksanaan program KUT untuk dapat betul-betul mampu membantu usaha petani. Kompleksitas tersebut juga ikut memperpanjang ‘mata rantai’ proses pengambilan keputusan organisasi manajemen KUD yang pada gilirannya malah menimbulkan peluang terjadinya inefisiensi dan penyimpangan. Seorang petani mengatakan: “sing ngurus ngiris” (siapa yang mengelola pasti ikut memanfaatkan), semakin banyak pihak ikut mengelola, semakin banyak pula ‘irisannya” atau potongan biaya”nya.

²⁸ Baca pula lampiran artikel: “Banyak dana KUT tidak Sampai ke Petani” (Harian *Kompas*, 29 Juli, 2000).

Paket kredit KUT per satu hektar MTMH 98/99 adalah Rp. 991.000 dengan perincian sebagai berikut:

1.	Urea , 250 Kg	Rp. 112.500
2.	TSP 36, 125 Kg	Rp. 84.375
3.	ZA, 100 Kg	Rp. 50.625
4.	KCL, 100 Kg	Rp. 200.000
5.	Benih , 25 Kg	Rp. 37.500
6.	Pestisida	Rp. 100.000
7.	Herbisida	Rp. 156.000
8.	ZPT (zat pelengkap tumbuh)	Rp. 64.000
9.	Biaya garap tanah	Rp. 135.000
10.	Biaya pengelolaan hasil	Rp. <u>51.000 +</u>
Jumlah:		Rp. 991.000 atau hampir Rp. 1 juta/ha

Seorang petani dapat mengajukan pinjaman sesuai dengan kebutuhan luas sawah garapannya, dan rata-rata pinjaman adalah 0,3 ha s/d 2 ha per peminjam.

KUD Mina di Bondet juga mengakui adanya ‘kegagalan’ dalam mengelola dana ‘operasi pengadaan beras’ sebesar Rp. 200 juta. Dana ini pada dasarnya merupakan modal KUD yang berasal dari ‘dana pinjaman komersial’ dengan tingkat suku bunga 18% per tahun. Pada masa krisis (1998/99) bunga simpanan perbankan yang mencapai tingkat sangat tinggi (yaitu di atas 50% per tahun) telah ‘merangsang’ KUD Mina untuk ikut ‘bermain’ dengan memasukkan dana tersebut ke bank. Namun dengan adanya perubahan kebijakan berupa penurunan tingkat suku bunga pinjam bank menjadi 14 % per tahun, maka KUD Mina di Bondet telah mengalami kerugian karena harus membayar bunga pinjaman modal sebesar 18% per tahun. Karena alasan ini, Ketua KUD Bondet kini merasa jera dan telah mengembalikan dana pinjaman tersebut ke Bank dengan masih menanggung kerugian sebesar Rp. 5juta ditambah beban asuransi 1% per tahun dari total pinjaman yang harus dibayar ke Perum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK).

3.1.2 Kredit Program

Kredit Program, yang biasanya berupa dana bergulir, diprakarsai oleh pemerintah guna menyediakan fasilitas permodalan dalam upaya, secara sengaja dan secara khusus, membantu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat di desa (dalam kajian ini lembaga-lembaga permodalan tersebut dapat dikategorikan sebagai *quasi financial institution*). Program-program tersebut antara lain: Takesra/Kukesra, Jaring Pengaman Sosial melalui Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (JPS PDM-DKE), dll. Implementasi program-program tersebut pada umumnya dikelola melalui pendekatan langsung ke kelompok masyarakat sehingga kredit program ini sering dikelompokkan dalam kelompok kredit informal

Di Desa Buyut, tercatat 4 Kredit Program, yaitu Takesra/Kukesra, UED-SP (Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam), UP2K (Usaha Peningkatan Penghasilan Keluarga), dan PDM-DKE. Takesra/Kukesra disediakan oleh BKKBN dan disalurkan melalui kelompok ibu-ibu peserta KB; UED-SP disediakan oleh pemerintah (pusat) melalui LKMD; UP2K disediakan oleh Pemerintah Daerah (Kantor Bupati Cirebon Utara) melalui kelompok ibu-ibu Posyandu; sedang PDM-DKE merupakan program JPS untuk

mengatasi dampak krisis. Keempat program tersebut diperkenalkan pada saat krisis menerpa, beberapa sejak tahun 1998.

Pelaksanaan program ini, baik di Desa Mertasinga, Desa Buyut, maupun di desa-desa lain di wilayah Kecamatan Cirebon Utara, diduga telah mengalami kegagalan²⁹. Salah satu indikator kuat adalah adanya sikap tertutup dan keengganan pihak perangkat desa maupun pengurus dalam memberikan informasi maupun menunjukkan administrasi (pembukuan) pelaksanaan program-program tersebut. Namun, secara umum mereka mengaku bahwa program tersebut merupakan program pemerintah yang dianggap gagal. Kegagalan tersebut dalam arti bahwa tidak ada dana yang mampu dikembangkan secara bergulir sesuai dengan tujuan program. Bahkan, dana-dana yang disalurkan ke desa dianggap sebagai dana milik pemerintah dan sebagai 'hadiah' yang tidak perlu dikembalikan. Kondisi semacam ini lebih diperburuk dengan rendahnya semangat profesionalisme pengurus kelompok³⁰.

1. Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam (UED -SP)

Kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah salah satu program pemerintah pusat untuk mendorong partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan. Kegiatan ini dikoordinasikan dalam wadah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dan pelaksanaannya mengikutsertakan unsur-unsur Pemerintah Desa/Kelurahan, LKMD dan masyarakat setempat.

Di Desa Buyut, UED-SP dimulai sejak Maret 1999 dengan modal Rp. 2 juta, dan sekarang telah berkembang menjadi Rp. 2,8 juta. Jumlah anggota berkembang dari 8 orang menjadi 32 orang, 22 diantaranya perempuan. Setiap orang yang ingin mendapat pinjaman UED-SP harus menjadi anggota, dan wajib membayar simpanan Rp. 2.000 dan uang '*celengan*' (tabungan). Besar pinjaman yang diberikan antara Rp. 50 ribu–Rp. 400 ribu per orang. Setiap pinjaman Rp. 100 ribu diwajibkan membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 6.000 dan dikenakan pada angsuran Minggu ke-1, serta Rp. 6.000 sebagai Simpanan Wajib pada Minggu ke-2. Untuk Minggu ke-3 dan seterusnya membayar cicilan pinjaman Rp. 10.000 per minggu selama 10 kali. Atau dengan kata lain terdapat 'biaya pinjaman' (*cost of fund*) anggota sebesar 12%. Untuk peminjaman UED-SP ini persyaratannya sangat ringan, yaitu hanya pasphoto 1 buah serta ijin dari suami atau isteri. Dalam kasus di Desa Buyut pamong desa untuk sementara tidak boleh meminjam. Struktur organisasi UED-SP dapat dilihat dalam Diagram 2 di bawah ini.

2. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)

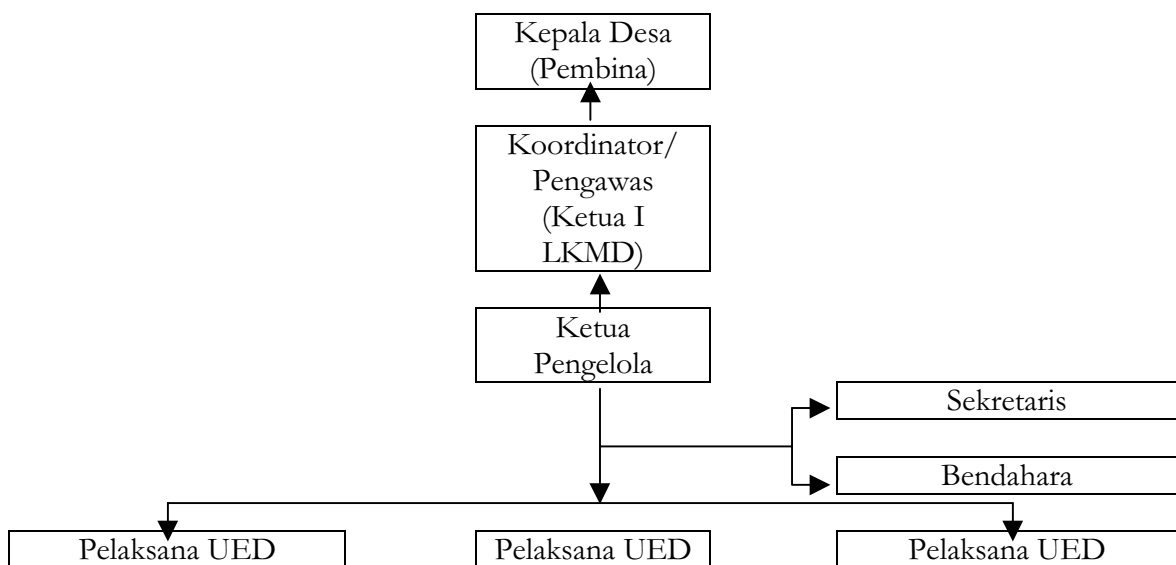
Dana program UP2K berasal dari bantuan subsidi dari Kabupaten Cirebon pada tahun 1998 yang besarnya hanya Rp. 500 ribu per desa. Program ini ditujukan kepada kelompok ibu-ibu PKK atau Posyandu yang dapat dibagi kedalam beberapa kelompok per desa. Di Desa Buyut, dana hanya disalurkan kepada dua kelompok Posyandu

²⁹ Selama ini sudah banyak program-program sejenis yang diperkenalkan oleh pemerintah ke masyarakat Desa, namun belum banyak yang berhasil baik. Ada pengakuan dari beberapa 'tokoh masyarakat' di Desa, bahwa di masa lalu program-program semacam ini sering menjadi kegiatan '*money politic*' untuk mendukung penguatan kegiatan partai politik tertentu.

³⁰ Berbeda dengan pengelola BKD, kebanyakan pengelola program dana bergulir menganggap bahwa kegiatan tersebut adalah sebagai 'kegiatan sosial' yang tidak memerlukan sikap profesionalisme. Bahkan seringkali malah dianggap sebagai 'beban tambahan' karena tidak ada insentif berupa uang.

masing-masing sebesar Rp. 200 ribu dan Rp. 150 ribu, setelah dipotong oleh Pemda sebagai biaya pelatihan yang menurut pengelola sekitar Rp. 150.000. Setiap anggota diberikan pinjaman sebesar Rp. 20 ribu, dengan pembayaran Rp. 2.000 per minggu selama 11 minggu. Dari dua kelompok tersebut ternyata hanya satu kelompok yang dapat berkembang dan sekarang modalnya telah berkembang menjadi Rp 400 ribu, sedangkan kelompok lainnya macet. Di Desa Mertasinga, program ini juga macet dan tidak diteruskan lagi.

Diagram 2:
Struktur Organisasi UED-SP



Susunan personalia pengurus UED adalah sbb:

Pembina : Kepala Desa
Koordinator/Pengawas : Ketua I LKMD
Pengelola UED :

Ketua: Ketua Seksi Pembangunan, Perekonomian dan Koperasi atau tokoh masyarakat yang mempunyai minat dan kemampuan di bidang pengelolaan usaha ekonomi desa.

Sekretaris: Kader Pembangunan Desa (KPD) atau tokoh masyarakat yang mempunyai minat dan kemampuan di bidang pengelolaan ekonomi desa.

Bendahara: Kader Pembangunan Desa (KPD) atau tokoh masyarakat yang mempunyai minat dan kemampuan di bidang pengelolaan ekonomi desa.

Pelaksana UED: Anggota masyarakat dari golongan masyarakat berpendapatan rendah, yang mempunyai minat untuk melaksanakan kegiatan usaha ekonomi.

3. PDM-DKE

Salah satu bentuk program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang memberikan program kredit untuk kegiatan ekonomi adalah Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE). Program PDM-DKE merupakan salah satu bantuan langsung kepada masyarakat miskin dan yang jatuh miskin akibat krisis ekonomi. Secara umum sasaran dari program PDM-DKE terutama adalah pada KPS, KS1 dan pengangguran yang ada di setiap desa/kelurahan. Sesuai dengan tujuan pemberdayaan, program ini dirancang sangat lentur (*flexible*), dalam arti dana dapat digunakan baik untuk kegiatan yang bersifat fisik (pembangunan prasarana ekonomi maupun sosial) maupun kegiatan ekonomi (melalui penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha).³¹

Di Desa Mertasinga, Cirebon, hanya 30% dana PDM-DKE digunakan untuk pinjaman dana bergulir. Dana diberikan kepada 4 kelompok usaha, yaitu kerang hijau, ikan asin, rajungan dan *gerabandan* (warung dsb). Setiap kelompok akan memperoleh Rp. 4 juta, dengan besar pinjaman Rp. 200 ribu per anggota. Namun jumlah dana yang diterima ternyata hanya sebesar 70%, dan sisanya belum diserahkan hingga sekarang. Seorang pengurus kelompok menduga bahwa uang tersebut diambil oleh Kepala Desa dan tidak diserahkan kepada kelompok. Pinjaman bergulir pada umumnya macet total dan tidak sempat bergulir, dan usaha ikan asin macet pada putaran kedua. Dari kelompok usaha ikan asin dari anggota sebanyak 27 orang hanya 8 orang yang masih berjalan baik sementara dan 19 orang lainnya macet pada putaran pertama atau kedua. Di ketiga desa penelitian di Kabupaten Tanggamus program ini secara umum juga dinilai gagal. Dana bergulir berhenti pada kelompok-kelompok peminjam pertama, demikian pula di dua wilayah penelitian yang lain.

3.1.3 Kredit Informal

Kredit informal dalam studi ini adalah kegiatan utang-piutang melalui lembaga keuangan dan perbankan yang tidak berbadan hukum dan beroperasi sampai di tingkat desa, bahkan langsung dari rumah ke rumah.

1. Bank Harian/Bank Keliling/ *Renternir*

Untuk tetap mempertahankan kegiatan ekonomi sehari-hari sebagian besar masyarakat desa masih tetap terikat dengan rentenir atau pelepas uang (*money lenders*) dengan sistem angsuran harian. Beberapa informan kunci di tingkat desa memperkirakan lebih dari 50 % rumah tangga, baik di Desa Mertasinga dan Desa Buyut, masih terikat dengan rentenir yang beroperasi secara berkeliling dengan sistem angsuran harian. Secara populer, masyarakat menyebut mereka sebagai “bank keliling” atau “bank harian”.

Meskipun memberlakukan biaya/bunga yang tinggi, namun fasilitas pinjaman dari rentenir sangat mudah diakses oleh masyarakat perdesaan. Aksesibilitas ini terutama lebih dinikmati oleh golongan masyarakat yang hanya mampu menyediakan uang tunai secara harian dan atau mempunyai pola pendapatan harian, seperti pedagang bakulan, usaha jasa (buruh tani, tukang cukur, tukang becak, dll) maupun buruh karyawan pabrik (rotan, rajungan dll). Namun sebaliknya, kelompok petani murni dengan pemilikan lahan

³¹ SMERU, Tahap Persiapan Pelaksanaan Program PDM-DKE, Hasil Penelitian Lapangan Kilat Tim SMERU di Empat Propinsi, Laporan Khusus, 7 Mei 1999.

kecil, ternyata tidak mudah untuk ikut memanfaatkan pelayanan renternir harian karena mereka tidak mampu menyediakan uang tunai secara harian³².

Fakta menunjukkan bahwa di daerah perdesaan banyak ditemui adanya praktek pelepas uang oleh pihak perorangan. Secara legal mereka mempunyai surat ijin sebagai lembaga koperasi yang ‘bernaung’ di bawah payung berbagai yayasan, terutama yayasan militer seperti Koperasi Veteran Indonesia (*Koveri*), Koperasi Baret Merah (*Kobame*), Induk Koperasi Primer Polisi (*Inkopol*), Induk Koperasi Primer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (*Inkopabri*), Induk Koperasi Primer Angkatan Darat (*Inkopad*), Induk Koperasi Primer Angkatan Udara (*Inkopau*), Induk Koperasi Primer Angkatan Laut (*Inkopal*). Yayasan-yayasan tersebut dimungkinkan untuk mempunyai bidang usaha yang beragam, antara lain usaha simpan pinjam. Usaha ini berbentuk Koperasi Usaha Simpan Pinjam uang yang populer dengan istilah “Kosipa” dan mendapatkan ijin operasi dari Kantor Departemen Koperasi. Karena pola tampilan operasionalnya yang berkeliling dan mirip dengan renternir, maka banyak masyarakat desa sering menyebut ‘Kosipa’ sebagai semacam renternir (*quasi renternir*).

Kosipa atau “bank keliling” dapat memberikan pinjaman secara ‘bebas’ tanpa memperdulikan pemanfaatan uang yang dipinjamkannya. Sebagai contoh, lihat box 1 berikut ini.

Box 1.

Pengalaman masyarakat meminjam ‘bank keliling’

Bu Csm, dari Desa Mertasinga, mempunyai pinjaman sebesar Rp 50 ribu kepada Bank Keliling (Kosipa) guna membeli boneka mainan untuk anak perempuannya. Pinjaman tersebut seharusnya dilunasi dalam 25 kali cicilan sebesar Rp. 2.500 per hari (hari libur dan hari Minggu tidak perlu mengangsur), tetapi pada kenyataannya pinjaman baru dapat dilunasinya dalam waktu 40 hari. Dalam contoh kasus ini, pinjaman tersebut dikenakan tingkat suku bunga 25% selama 40 hari atau 18,75 % per bulan. Bu Csm, juga seorang tukang potong rambut tradisional yang membuka usaha di rumah sendiri. Ketika ia harus membeli gunting potong rambut baru untuk salonnya, ia meminjam Rp. 100 ribu. Pinjaman diatas harus dilunasi dengan pola 30 kali angsuran @ Rp. 4.000 per hari. Ketika realisasi pinjaman tersebut dikenakan ‘simpanan wajib’ (*forced saving*) sebesar 5% atau Rp. 5.000, dan biaya administrasi 5% atau Rp. 5.000, keduanya dipotong dimuka sehingga pada saat menerima pinjaman, ia hanya menerima uang Rp. 90.000³³. Bila dihitung secara rasional maka pinjaman Rp. 90.000 tersebut telah dikenakan ‘biaya’ Rp. 30.000 atau 33,3% per bulan, atau 24,98% per 40 hari (apabila ia menunggak dalam mengangsur).

³² Kenyataan ini merupakan indikator bahwa renternir juga bekerja atas dasar pertimbangan resiko ekonomis. Sistim harian mempunyai tingkat “turn over” yang sangat tinggi dan lebih menguntungkan, karenanya belum dijumpai “bank keliling” dengan sistim angsuran jangka panjang bulanan, apalagi musiman.

³³ Istilah setempat, simpanan wajib dan biaya administrasi disebut sebagai “*jabutan*”, artinya sudah dianggap sebagai “biaya” yang harus dikeluarkan untuk mendapat pinjaman kredit. Simpanan Wajib tersebut tidak jelas administrasinya, namun pada bulan Lebaran Bu Csm, sering mendapat ‘pengembalian’ simpanan sekitar Rp. 50 ribu. Ironisnya pengembalian ini sering ditafsirkan masyarakat Desa sebagai ‘bonus’ atau ‘hadiah Lebaran’ yang diberikan oleh renternir kepada peminjam. Bu Csm sudah bertahun-tahun berhubungan dengan Kosipa.

Dari seorang petugas Kosipa yang berhasil ditemui oleh Tim SMERU, Pak R³⁴, diperoleh informasi bahwa secara administratif ia memang menggunakan “ijin legal” Kosipa Koveri, namun dalam operasinya Pak R menggunakan modal sendiri sebesar Rp. 40 juta³⁵. Pak R melayani lebih dari 500 peminjam yang tersebar di empat kecamatan di Kabupaten Cirebon. Secara terpisah istrinya juga menjalankan usaha yang sama sebagai pelepas uang di Pasar Celancang. Sebelum memulai usaha di suatu desa, Pak R terlebih dahulu melakukan semacam *feasibility study* secara lengkap tentang berbagai aspek di daerah yang bersangkutan, terutama tentang aspek keamanan, perilaku sosial ekonomi dan budaya masyarakat desa setempat. Hasil pengamatan tersebut masih ditambah dengan semacam *‘cross information’* dari berbagai pihak termasuk dengan ‘jaringan – jaringan khusus’ yang dimilikinya, baik di dalam desa maupun di luar desa. Pemahaman yang sangat lengkap dan menyeluruh semacam itulah yang telah membantu Pak R terhindar atau tidak pernah terlibat dalam ‘keributan’ dengan masyarakat setempat. Ditegaskan olehnya, bahwa kunci sukses bisnisnya adalah “menjaga persaudaraan” dengan masyarakat setempat. Prosedur penunjukkan KTP guna pengisian formulir hanyalah formalitas yang tidak terlalu penting baginya. Sebaliknya, ketajaman intuisi dan pemahaman terhadap calon peminjam jauh lebih penting.

Dikatakan oleh Pak R bahwa usaha pemberian pinjaman uang semacam ini sebetulnya merupakan usaha yang sangat “keras” baik dari segi waktu maupun fisik. Ia mulai bekerja sejak pukul 07:00 pagi dan pulang pukul 21:00 malam, setiap hari dari Senin s/d hari Sabtu (hari Minggu tidak bekerja). Dijelaskan oleh Pak R, bahwa bunga pinjaman yang diberlakukan memang nampak sangat tinggi, namun apabila diperhitungkan dengan biaya operasional dan ‘berbagai macam pengeluaran dan biaya ekstra lainnya’, maka bunga riil atau keuntungan bersih yang diterima hanya 5% per bulan. Ia memberikan suatu ilustrasi bahwa ketika menghadapi pinjaman yang seharusnya lunas dalam 24 hari tetapi berkepanjangan menjadi 30 sampai 40 hari, ia harus bersabar, tidak boleh marah, dan malahan harus memahami kondisi peminjam.

Selama masa krisis ekonomi, banyak peminjam di desa yang tidak mampu mengangsur tepat waktu atau melunasi pinjaman yang sudah jatuh tempo. Mereka bahkan mengajukan pinjaman baru untuk menutup pinjaman sebelumnya (*roll over*). Secara financial, ini sebetulnya merupakan upaya “gali lubang tutup lubang” yang justru semakin memberatkan peminjam.

2. Kredit barang (“*mijndreeng*”= *mindring*)

Kredit ‘*mijndreeng*’ (*mindring*) adalah sistem pembelian barang (*in-kind*) dengan sistem kredit yang masih populer di pedesaan. Dari segi pemberlakuan suku bunga, kredit *mindring* memang disadari oleh pihak peminjam dan yang meminjamkan sebagai ‘mahal’ - harga kredit biasanya hampir dua kali lipat dari harga tunai. Sebagai contoh, harga satu lusin gelas di toko di kota Cirebon secara tunai Rp. 25.000. Namun apabila diperoleh dengan sistem kredit *mindring* harganya menjadi Rp. 50.000 dengan cara mengangsur sepuluh

³⁴ Karena alasan ‘kode etik’, Tim SMERU sengaja melindungi nama dan identitas informan.

³⁵ Tidak diperoleh informasi tentang ‘bagi hasil usaha’ antara ‘petugas’ dengan Kosipa Koveri (sangat tertutup). Penggunaan modal sendiri dari si ‘petugas’ sekaligus juga memperkuat dugaan bahwa kegiatan Kosipa semacam itu adalah mumi sebagai praktek rentenir (*money lenders*). Penggunaan modal sendiri atas nama koperasi semacam itu juga lazim ditemui di Kosipa-Kosipa yang beroperasi di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

kali @ Rp. 5.000 per minggu. Menurut pengalaman beberapa responden, pada kenyataannya, kredit tersebut baru dilunasi dalam waktu lebih dari tiga bulan. Bahkan kadang-kadang, si peminjam tidak harus mencicil penuh Rp. 5.000 per minggu, melainkan Rp. 2.000 atau Rp. 3.000 per minggu sesuai dengan kondisi keuangannya. Masyarakat perdesaan tetap memanfaatkan fasilitas “*mindring*” karena dua alasan: pertama, mereka memang tidak punya kemampuan menyediakan uang tunai; kedua, ‘menghemat’ waktu dan biaya transport bila mereka harus pergi sendiri ke pasar di kota. Pemahaman ini menunjukkan bahwa masyarakat desa sudah mempunyai *economic sense* yang cukup rasional. Mereka juga mempunyai konsep *opportunity cost* yang cukup realistis. Jika mereka harus pergi ke kota untuk mengangsur pinjaman, di samping mengeluarkan biaya transport juga berarti akan kehilangan kesempatan untuk bekerja sebagai buruh³⁶.

Barang-barang yang ditawarkan oleh *mindring* pada umumnya berupa peralatan dapur, seperti piring, gelas, panci, thermos maupun barang kebutuhan lain seperti kain, jam dinding, dan barang-barang kebutuhan rumah tangga lainnya³⁷.

3. Warung/kios

Tata niaga usaha warungan (kios) di desa tidak lepas dari ‘sistim *ngebon*’ yaitu sistim transaksi jual-beli dimana pihak pembeli dapat mengambil barang terlebih dahulu dan membayar kemudian dengan harga yang tidak berubah atas dasar hubungan kekerabatan bertetangga dan saling percaya³⁸. Dari pihak pengusaha warung hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan volume penjualannya. Sedang dari pihak ‘*pengebon*’ (pembeli) hal ini disebabkan ketidakmampuan mereka menyediakan uang tunai³⁹. Kebiasaan semacam ini memang sudah lazim di masyarakat, termasuk di perdesaan terutama dikalangan nelayan, petani, maupun kaum pekerja pabrik (buruh). Barang-barang yang dibeli biasanya berupa bahan-bahan konsumsi sehari-hari, dan kebutuhan pokok lainnya.

Di komunitas nelayan Desa Mertasinga, sebuah warung umumnya sudah memiliki langganan sejumlah nelayan. Para nelayan langganan tersebut biasanya meminjam berbagai keperluan melaut seperti: solar, minyak tanah, minyak goreng, beras, gula, kopi dan rokok, sebelum berangkat melaut. Pinjaman tersebut bervariasi dari Rp. 10 ribu - Rp. 150 ribu. Nelayan mengembalikan pinjaman setelah memperoleh uang dari hasil penjualan ikan tangkapannya. Di Desa Buyut, sistim ‘*ngebon*’ ini lebih sering terjadi dikalangan buruh pabrik rotan dan petani. Seorang pengusaha warung di Desa Buyut mengemukakan bahwa dari perputaran usahanya sebanyak Rp. 8 juta per minggu, sekitar Rp. 2 juta ‘beredar’ dengan ‘sistim *ngebon*’ (sekitar 30 orang). Sementara, pihak pengusaha warung memperoleh kredit pinjaman Kupedes dari BRI Unit Klayan.

³⁶ “Waktu” merupakan variabel yang sangat penting bagi kalangan kaum buruh (tani) yang hanya mengandalkan jasa tenaganya.

³⁷ Pembelian barang dengan sistim kredit ini bahkan semakin populer dimana-mana, tidak saja di kalangan masyarakat perDesaan namun juga perkotaan. Konsumerisme masyarakat telah memberikan ‘peluang bisnis’ bagi kalangan dunia usaha untuk menawarkan sistim kredit untuk penjualan barang-barang seperti, rumah, kendaraan bermotor, alat-alat elektronik seperti video, TV maupun barang –barang rumah tangga seperti furniture dan lain-lain.

³⁸ Sistim “*ngebon*” berbeda dengan sistim kredit yang biasanya mengenakan tingkat harga yang lebih tinggi.

³⁹ Dari sisi ‘*Cash ability*’, pihak *pengebon* adalah orang yang ‘*iliquid*’ tetapi *solvable*.

Beberapa petani tertentu⁴⁰ di Desa Buyut juga ‘ngebon’ saprodi pada satu-satunya kios saprodi di Desa Buyut, dan membayar setelah panen. Kios saprodi yang masih beroperasi dan berkembang ini milik seorang ketua kelompok tani. Berdasarkan catatan kios tersebut, beberapa petani ‘ngebon’ dan masih menunggak’. Menurut keterangan pemilik kios, sekitar Rp. 20 juta tunggakan diperkirakan tidak akan kembali. Ia masih berharap sekitar Rp. 30 juta tunggakan masih akan kembali. Saat ini ia mendapat kredit dari BRI Rp. 20 juta. Kredit BRI diperoleh sejak beberapa tahun yang lalu, mulai dari pinjaman Rp. 7,5 juta, ketika ia masih menjadi tukang jahit. Karena BRI memiliki catatan yang bagus tentangnya, BRI menawarkan kredit yang lebih besar. Namun ia belum ingin mengambil tawaran tersebut. Kini ia mengembangkan beberapa usaha, antara lain penggilingan tepung.

Beberapa petani lainnya yang ditemui menyatakan tidak dapat ‘ngebon’ pada kios dimaksud dan tidak mengetahui alasannya; diduga karena mereka bukan merupakan anggota kelompok tani pemilik kios.

4. Arisan

Arisan adalah kegiatan yang memadukan ‘kebutuhan sosial’ dan ‘kebutuhan ekonomi’ pada tingkat komunitas. Perimbangan antara kedua kebutuhan tersebut bervariasi tergantung dari kesepakatan kelompok yang bersangkutan. Misalnya satu kelompok lebih menekankan pada aspek paguyuban sosial daripada aspek ekonomisnya (karena itu jumlah uang relatif kecil, misalnya Rp. 2.500 per minggu). Meskipun demikian, dari sisi ekonomi, arisan merupakan kegiatan menabung secara berkelompok dan bergilir diantara aggotanya. Setiap anggota peserta arisan akan menerima haknya secara bergantian berdasarkan hasil undian.

Dalam perkembangannya, bentuk arisannya sendiri tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang (*in-kind*) berupa barang kebutuhan rumah tangga seperti piring, ‘magic jar’, barang pecah belah lainnya atau bahan bangunan. Meskipun tidak selalu, kegiatan arisan terutama lebih banyak dilakukan oleh ibu-ibu yang memiliki penghasilan harian, seperti pedagang warung, industri kecil dan buruh kerajinan rotan. Seorang ibu di Desa Buyut yang mengikuti beberapa arisan uang secara mingguan dan bulanan menyebutkan bahwa jumlah uang arisan yang harus dibayar mencapai Rp. 80 ribu per bulan, dengan besar *tarikan* arisan tertinggi mencapai Rp. 1 juta.

Arisan barang yang cukup populer, khususnya di Desa Buyut, adalah arisan bahan bangunan berupa arisan semen, arisan keramik atau arisan kayu. Arisan bahan bangunan ini secara positif telah ikut mendorong peningkatan kualitas bangunan perumahan di kalangan masyarakat. Harga bahan bangunan ditetapkan mengikuti harga pasar, sehingga jumlah bahan bangunan yang diterima tidak berkurang meskipun harganya naik. Misalnya arisan semen 3 zak per orang per bulan dengan anggota 20 orang akan diterima 60 karung semen pada saat *narik*. Sedangkan untuk arisan keramik, jenis dan type serta warna bahan ditentukan oleh si penarik (‘pemenang’) ketika itu, namun tetap sesuai dengan merek, standar mutu dan harga yang disepakati bersama oleh seluruh anggota. Arisan bahan bangunan biasanya diikuti oleh anggota masyarakat yang memiliki penghasilan lebih dan mempunyai rencana akan membangun rumahnya. Selain ikut

⁴⁰ Anggota Kelompok Tani A, sedang warung/kios saprodi yang memberikan pinjaman adalah milik Ketua Kelompok Tani A.

arisan bahan bangunan, kelompok rumah tangga ini biasanya juga menyimpan ('menitip') bahan bangunan yang dibeli kepada pengusaha material, sehingga pada waktu bahan bangunan dibutuhkan harga barang tidak naik dan jumlahnya tetap seperti semula.

3.1.4 Kredit Jaringan kerja/usaha (networking)

Fasilitas permodalan jaringan kerja/usaha ini bersifat vertikal dengan lini pelaku usaha di atasnya (*vertical linkages*). Jaringan ini ditemui di Desa Mertasinga di kalangan nelayan dimana terdapat fasilitas permodalan yang dapat diakses oleh nelayan, bakul, tengkulak maupun pengusaha karena mereka mempunyai ikatan jaringan usaha (*business net work*)⁴¹. Pola jaringan usaha tersebut dapat dipahami dengan lebih jelas melalui diagram dari masing-masing komoditi (rajungan, kerang, ikan asin dan ikan segar) di bawah ini. Fasilitas permodalan melalui jaringan kerja/usaha ini juga ditemui di Desa Buyut, yaitu pada industri mebel. Satu pengusaha mebel perempuan yang cukup sukses menjelaskan bahwa ia dapat memperoleh modal berupa uang atau barang (kayu) dari juragannya, yaitu pengusaha di kota yang selalu memesan mebel (dengan desain yang telah ditentukan) kepadanya. Pinjaman ini dibayar ketika ia mengantar barang atau ketika mebelnya telah laku dijual. Menurutnya, pinjaman ini tidak dikenakan biaya/bunga.

1. Jaringan kerja nelayan rajungan

Jaringan usaha yang paling intensif dapat dijumpai pada komunitas nelayan *rajungan* di Desa Mertasinga, Cirebon. Jaringan ini terbentuk setelah unit kerja dari PT. Philips Seafood Indonesia yang memiliki Cabang di Pemalang, Jawa Tengah dibuka pada tahun 1996. PT Philip membuka beberapa unit *mini-plant* pengolahan rajungan di tingkat desa yang pengelolaannya diserahkan kepada pengusaha pengupasan rajungan di desa setempat. Sekarang terdapat 8 *mini-plant* yang dibangun oleh PT. Philips Seafood Indonesia maupun oleh perusahaan lain sebagai pesaingnya, seperti PT. Tonga Tiur Putra dan PT Windhu Utama⁴².

Dalam hubungan ini, pihak perusahaan hanya menetapkan standar kualitas dan harga beli rajungan. Berdasarkan standar ini, pengelola mini-plant kemudian menetapkan harga (biasanya sedikit lebih rendah) kepada jaringan di bawahnya, yaitu para pengepul, bakul dan juragan/nelayan. Pada saat penelitian dilakukan, di tingkat *mini-plant* harga beli rajungan segar ditetapkan sekitar Rp. 13 ribu – Rp. 15 ribu per kilogram bergantung kepada kualitas dan besarnya ukuran rajungan yang disetor.⁴³ Adanya kepastian pasar dan harga yang cukup tinggi (mencapai 4-5 kali harga ikan segar) telah menyebabkan sebagian besar nelayan di Desa Mertasinga lebih tertarik untuk menangkap rajungan.

⁴¹ Tim SMERU tidak menemukan adanya pola hubungan usaha semacam ini di kalangan usaha pertanian padi di Desa Buyut. Adanya pasar bebas, dan karakteristik supply komoditas padi yang bersifat massal serta pola kebiasaan petani Desa Buyut yang menjual hasil panen dengan cara bertahap diduga adalah alasan tidak berlakunya sistem jaringan ini di Desa Buyut.

⁴² Satu unit *mini-plant* menelan biaya sekitar Rp. 100 juta, semuanya ditanggung oleh perusahaan besar/pabrik pengolahan (packaging industries). *Mini-plant* hanya melakukan pengupasan rajungan segar menjadi daging yang dilakukan secara manual, selanjutnya dikirim ke pabrik pengolahan untuk pemrosesan akhir (dikalengkan).

⁴³ Daging rajungan dapat dibedakan kedalam lima jenis kualitas yaitu: kualitas Jumbo, Backfin, Special, Clawmeat, CF Jimmy dan CF Soak. Tingkat harga pembelian oleh pabrik dari pengelola mini-plant antara Rp.25 ribu – Rp.105 ribu per kg, atau dengan harga rata-rata Rp.70 ribu per kg.

Kondisi semacam ini pada akhirnya telah menciptakan persaingan yang ketat dalam mata rantai perdagangan rajungan, terutama untuk memperoleh dan mempertahankan kelangsungan suplai bahan baku rajungan. Diduga hal ini telah mempengaruhi munculnya penyediaan fasilitas permodalan semacam kredit yang terkait dengan jaringan kerja, yaitu antara: (i) nelayan dengan bakul; (ii) *bakul* dengan *pengepul*/pengelola miniplant; dan (iii) *pengepul*/pengelola mini-plant dengan perusahaan/pabrik pengolahan rajungan.

Pinjaman tersebut semata-mata harus digunakan untuk kebutuhan primer penangkapan rajungan, seperti untuk membeli/memperbaiki jaring, kapal atau mesin kapal. Selama rajungan dijual kepada mereka, kredit tidak perlu “dikembalikan” dan dianggap sebagai tanda pengikat agar peminjam selalu menjual rajungan kepadanya. Berdasarkan keterangan dari informan, seorang nelayan dapat meminjam secara kumulatif antara Rp. 300 ribu – Rp. 2 juta, *juragan* (pemilik kapal) antara Rp. 1 juta – Rp. 5 juta dari bakul; dan seorang bakul dapat meminjam Rp. 3 juta - Rp. 10 juta dari *pengepul*/pengelola mini-plant. Seorang *pengepul* pengelola *mini-plant* milik perusahaan besar, mengaku memberikan pinjaman mencapai sekitar Rp. 500 juta kepada sekitar 40 bakul dan pemilik perahu langganannya (lihat diagram).

Meskipun demikian, dilihat dari segi bisnis, pemberian pinjaman tersebut tidak dapat dikatakan percuma. Hal ini karena pihak nelayan peminjam memperoleh harga jual lebih rendah Rp. 1.000 – Rp. 2.000 per kilogram dibanding harga pasar. Misalnya, harga pasar rajungan pada tingkat bakul Rp. 12.000 per kg, dibeli dari nelayan peminjam sekitar Rp. 10.000-Rp. 11.000 per kg. Dengan hasil tangkapan rajungan nelayan yang berkisar 50 kg per hari, dan rata-rata penangkapan 10-20 kali per bulan, maka diperkirakan bahwa pinjaman-pinjaman nelayan tersebut telah terlunasi dan bahkan sudah melampaui beban kewajibannya.

2. Jaringan kerja nelayan kerang

Jaringan kerja nelayan kerang juga dijumpai di Cirebon. Jaringan ini merupakan salah satu upaya pedagang pengumpul (*pengepul*) kerang untuk mempertahankan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) atas komoditas kerang yang diusahakan, terutama kerang hijau. Usaha mempertahankan suplai kerang hijau dilakukan dengan dua cara: (i) menjalin kemitraan dengan petani (budidaya ternak) kerang hijau, dan (ii) membiayai perahu-perahu nelayan pencari kerang hijau. Sementara itu, untuk mempertahankan pemasaran, pedagang pengumpul memberikan pinjaman kepada para bakul yang akan menjual kerang hijau secara eceran (*retail*) di pasar.

Guna mempertahankan kontinuitas suplai kerang hijau, seorang *pengepul* di Desa Mertasinga telah membiayai 10 unit pemeliharaan kerang hijau dan sekitar 15 perahu nelayan. Satu unit pemeliharaan kerang hijau membutuhkan dana sekitar Rp. 5 juta, dengan masa pemeliharaan selama 6 bulan dan masa panen kurang lebih 2 minggu. *Pengepul* memberikan pinjaman kepada petani kerang hijau sekitar Rp. 1 juta per unit, dan pinjaman akan diperhitungkan pada saat panen. Seperti pada komoditas rajungan, *pengepul* juga membiayai kebutuhan nelayan untuk membeli/ memperbaiki jaring, kapal atau mesin kapal. Pinjaman kumulatif mereka berkisar antara Rp. 3 juta – Rp. 6 juta per perahu, dengan rata-rata pinjaman antara Rp. 600 ribu – Rp. 1 juta per tahun. Selama mereka menjual hasil kerang kepadanya, maka pinjaman tersebut tidak perlu dikembalikan. Selain pinjaman tersebut, *pengepul* juga memberikan pinjaman kepada

nelayan untuk biaya hidup selama dikapal dan bagi keluarganya yang ditinggal di rumah. Besarnya biaya berkisar sekitar Rp. 600 ribu per perahu. Pinjaman ini harus dikembalikan dan akan diperhitungkan dari hasil tangkapan kerang hijau.

2. Jaringan ikan asin dan ikan segar

Usaha pengeringan ikan asin dan ikan segar adalah usaha skala kecil yang banyak diusahakan oleh masyarakat di Mertasinga. Kedua pola jaringan usaha ini relatif sama dan sederhana. Alasan pengusaha untuk menyediakan 'fasilitas pinjaman' kepada nelayan dan bakul ikan lebih didasarkan sebagai upaya memperoleh bahan baku, meskipun dalam hal ini juga sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh 'margin' keuntungan yang lebih tinggi.

Diagram 3
Jaringan Usaha dan Fasilitas Permodalan Komoditi Rajungan
Di Desa Mertasinga/Bondet, Cirebon Utara (studi kasus Pak Dj dan Pak Th)

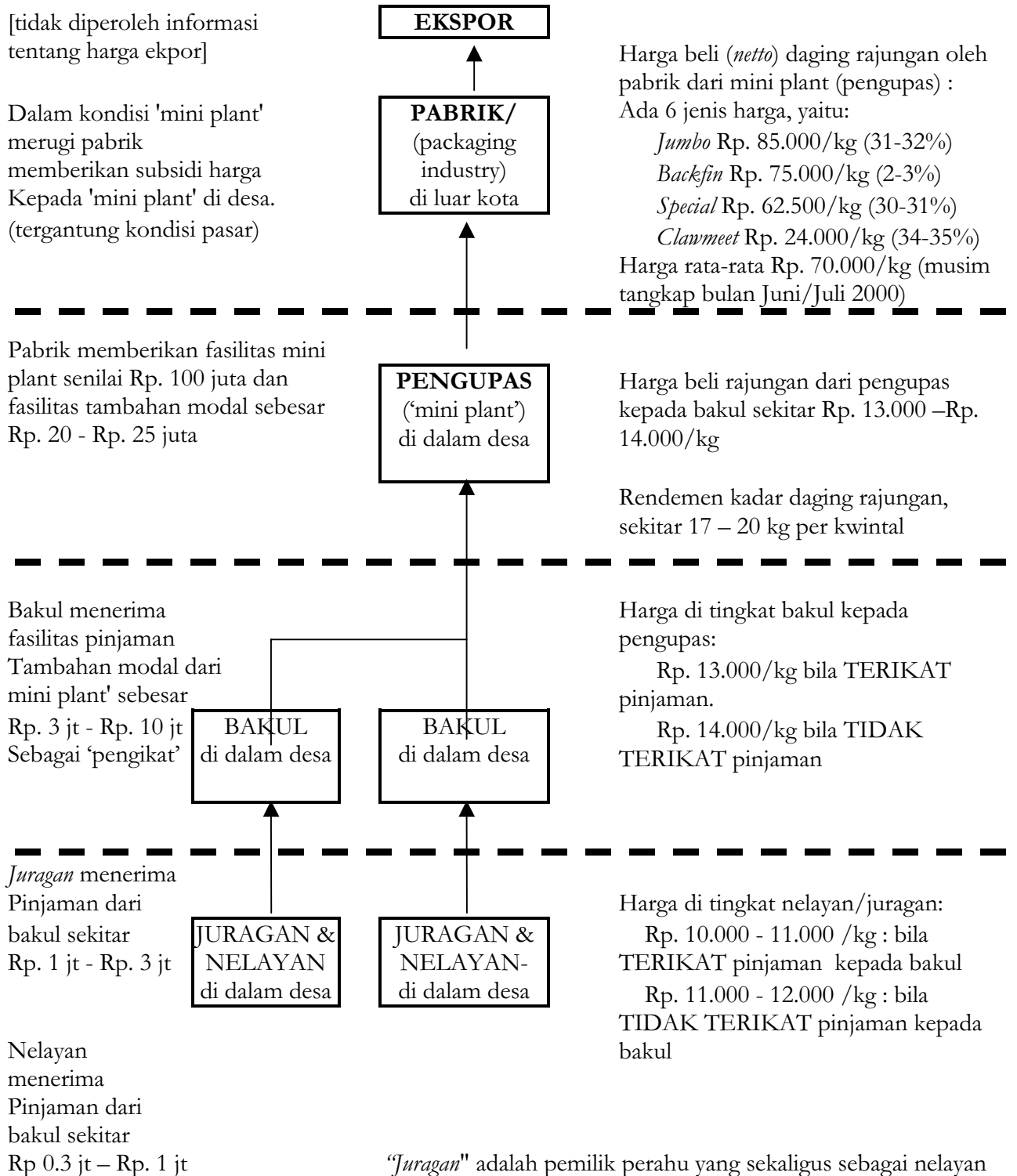
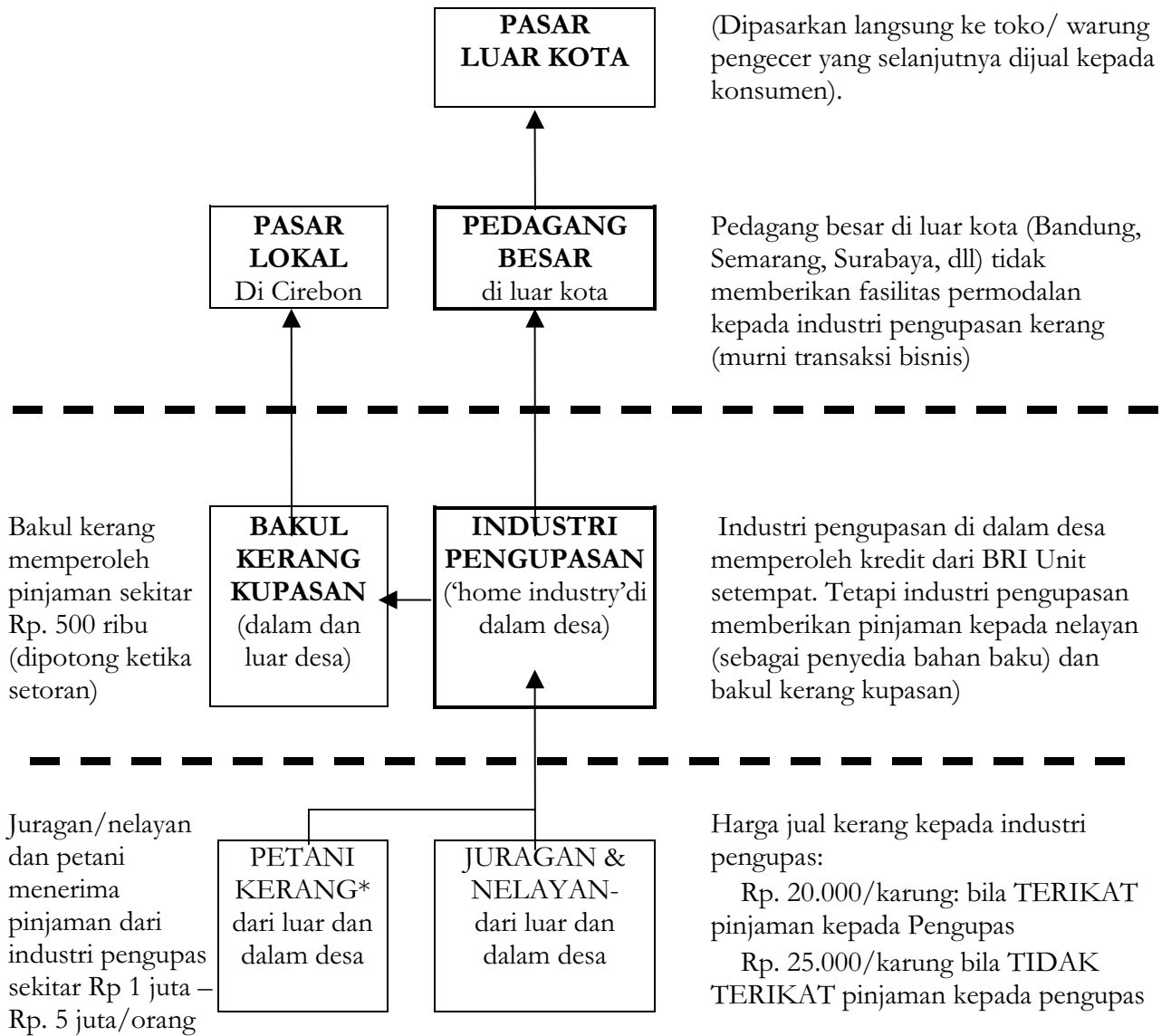


Diagram 4:
Jaringan Usaha dan Fasilitas Permodalan Komoditi Kerang
Di Desa Mertasinga/Bondet, Cirebon Utara.
(studi kasus Pak A. dan Pak H. S)



Catatan: * *petani kerang* adalah peternak budi daya kerang di sungai /laut.

Diagram 5
Jaringan Usaha dan Fasilitas Permodalan Komoditi Ikan Asin
Di Desa Mertasinga/Bondet, Cirebon Utara.
(studi kasus Pak S)

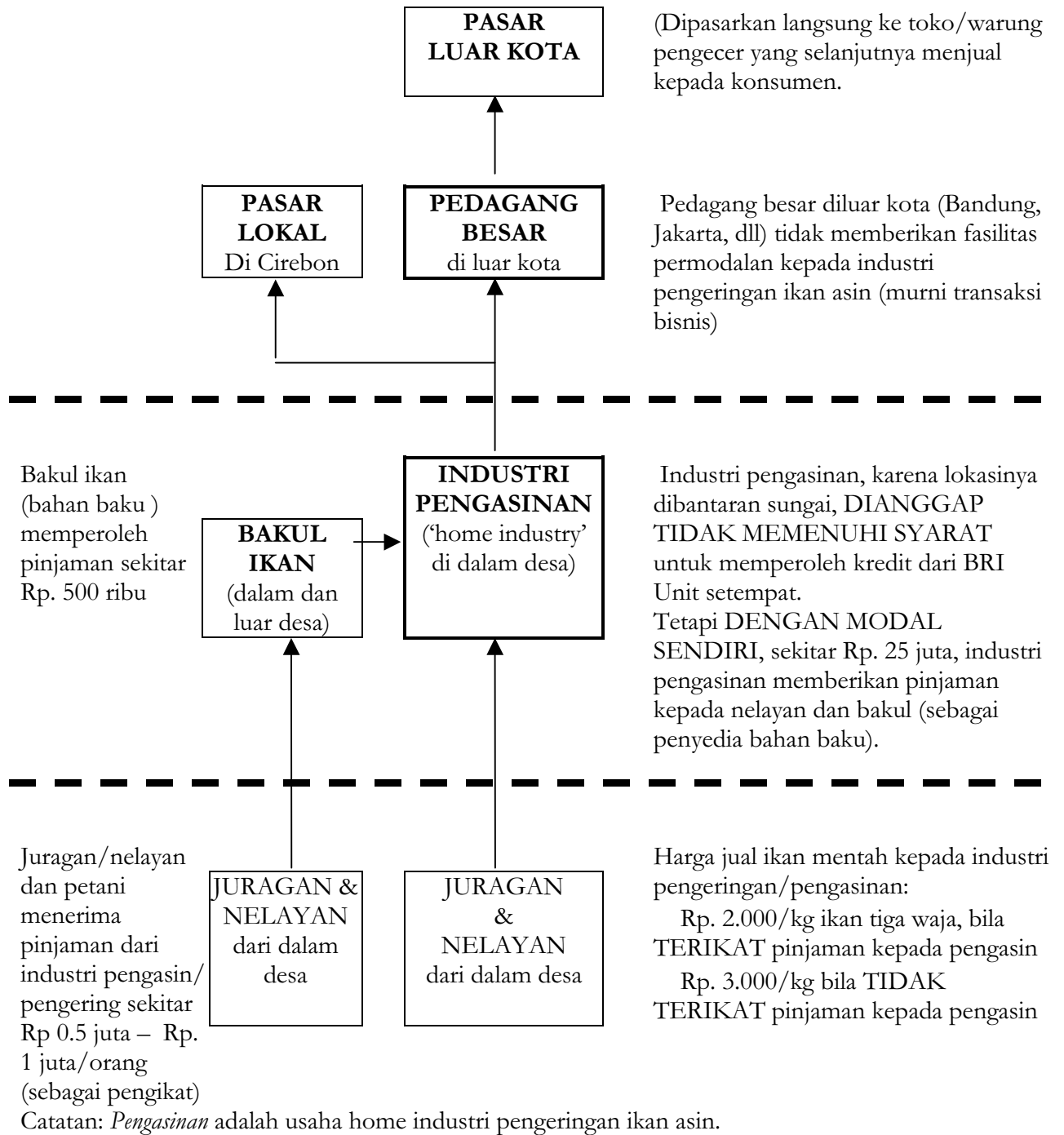
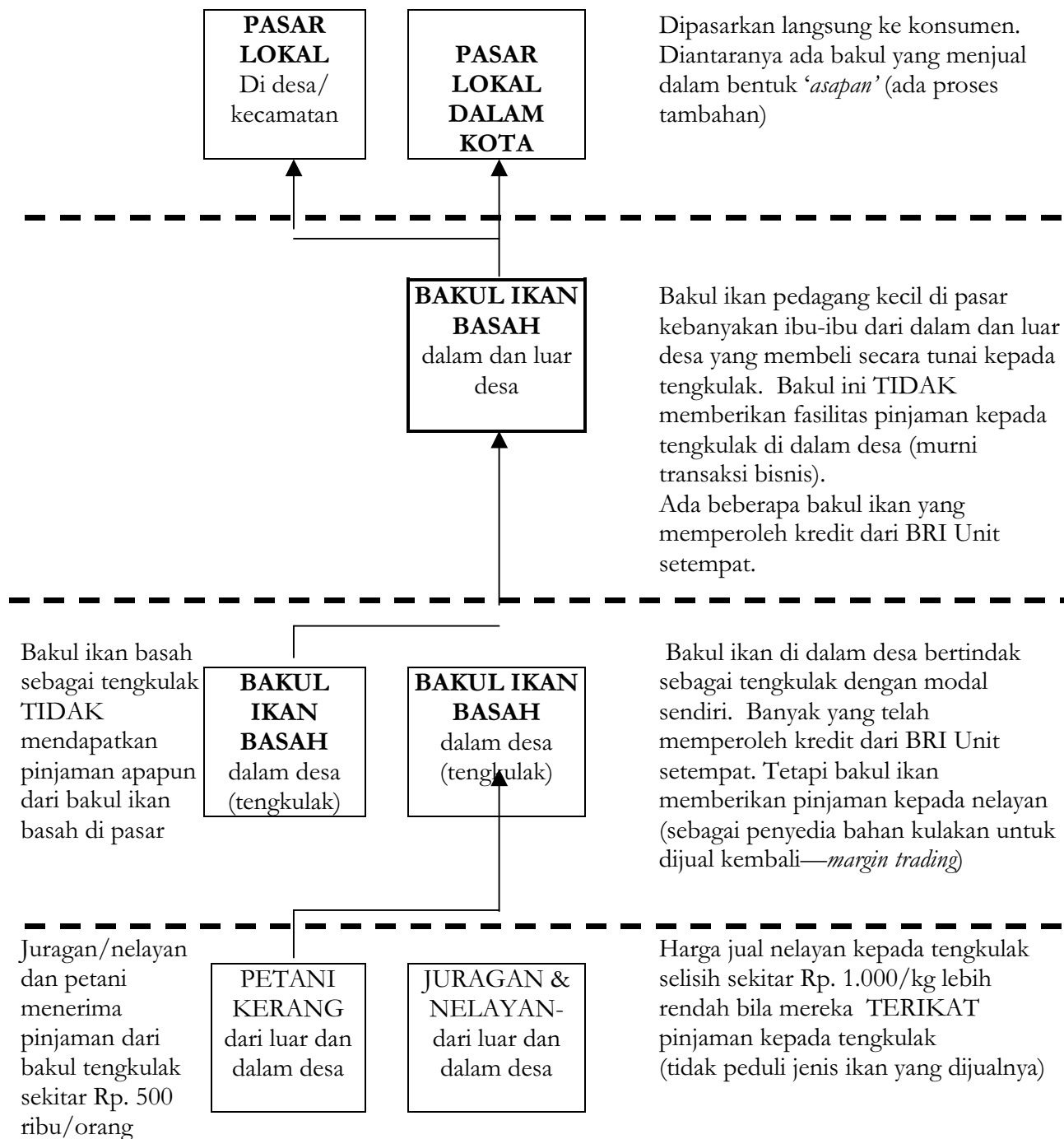


Diagram 6
Jaringan Usaha dan Fasilitas Permodalan Komoditi Ikan Segar
Di Desa Mertasinga/Bondet, Cirebon Utara
(studi kasus Bu D)



3.2 Akses, Hambatan, dan Pilihan Masyarakat terhadap Kredit

3.2.1 Aksesibilitas

Seperti terlihat di lapangan, berbagai kredit program bersubsidi yang ditawarkan pemerintah melalui lembaga perbankan tidak semuanya bisa dijangkau masyarakat. Hal ini terlihat dari akses masyarakat perdesaan terhadap kredit formal yang relatif rendah (untuk tidak mengatakan tertutup). Terutama jika masalah akses ini dikaitkan dengan masyarakat lapis bawah (*lower level*) - atau kelompok miskin dan termiskin - baik di komunitas nelayan maupun petani. Hasil studi menunjukkan bahwa sangat sedikit dari kalangan nelayan dan petani miskin yang menjadi nasabah dari skema kredit formal. Tidak sulit dipahami jika kemudian kelompok nelayan dan petani miskin semakin tergantung pada patron ekonomi tradisional mereka. Dan, yang jauh lebih buruk, mereka - dalam keadaan sangat terpaksa - harus berhubungan dengan pelepas uang atau rentenir.

Kondisi yang cukup jauh berbeda dirasakan oleh kalangan strata menengah ke atas, khususnya para pedagang atau pengusaha dan golongan berpenghasilan tetap. Baik di komunitas nelayan maupun petani, aksesibilitas kelompok ini terhadap skema kredit formal relatif masih cukup baik. Pada masa krisis ini nampaknya pihak lembaga keuangan formal (bank) bertindak lebih selektif dan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Konsekuensinya adalah untuk jumlah kredit tertentu yang relatif besar kian sulit diperoleh.

Dalam kondisi di mana tidak ada fasilitas kredit formal perbankan yang dapat diakses oleh anggota masyarakat di perdesaan tersebut, maka sudah sejak lama berkembang jenis-jenis skema kredit yang kebanyakan dalam bentuk koperasi simpan pinjam. Dalam kenyataannya, berbagai jenis kredit ini lebih menyerupai kredit rentenir terselubung yang menetapkan tingkat suku bunga tinggi (5%-20% per bulan), jangka waktu peminjaman pendek (1-2 bulan), dan cara pencicilan secara harian. Dalam skema kredit ini petugas kredit mendatangi rumah (calon) nasabah, baik untuk memberikan kredit maupun penagihan angsuran. Banyak anggota masyarakat yang mengambil skema kredit ini karena persyaratannya mudah dan karena tidak ada alternatif lain. Meskipun demikian, untuk kelompok tertentu - seperti petani murni yang hanya memiliki penguasaan lahan kecil - ternyata mereka tetap tidak dapat memanfaatkan jenis kredit ini.

Kredit formal yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah Kupedes dari BRI. Namun kredit ini ternyata hanya dapat diakses oleh Golbertap, pedagang, dan menengah ke atas. Sedangkan jenis kredit yang paling banyak dapat diakses oleh masyarakat miskin adalah kredit yang berasal dari kredit program. Pemerintah melalui berbagai program telah memberikan berbagai skema kredit yang dapat diakses oleh masyarakat miskin. Kredit ini semula diadakan dalam rangka pengentasan kemiskinan, dan setelah terjadi krisis ditambah dengan program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Sayangnya, penyaluran jenis kredit program ini banyak yang kurang berhasil. Di kalangan penerima kredit sering timbul anggapan bahwa dana kredit program berasal dari pemerintah yang tidak harus dikembalikan, sehingga banyak kredit yang akhirnya macet. Di samping itu juga karena terjadi kebocoran dan penyimpangan yang dilakukan baik oleh anggota kelompok ataupun pengelola program.

Bagi masyarakat golongan bawah yang bukan termiskin, mereka paling banyak memanfaatkan jenis kredit yang disediakan oleh rentenir atau bank keliling dan *mindring*. Adapun bentuk skema kredit lain yang 'lebih mudah' diakses oleh masyarakat perdesaan adalah sejenis kredit yang terkait dengan jaringan kerja informal. Skema kredit ini umumnya terdapat di daerah yang memiliki komoditas unggulan serta memiliki jaringan akses ke pasaran ekspor. Karena adanya persaingan yang ketat, maka antara petani, nelayan atau peternak selaku produsen dengan pedagang pengumpul atau pabrik terbentuk semacam jaringan kerja informal yang bersifat '*simbiose mutualistis*'. Disini petani atau nelayan dapat memperoleh fasilitas kredit yang diberikan oleh para pedagang pengumpul, tetapi sebagai konsekuensinya harus menjual komoditas produk yang dihasilkan kepada mereka. Bahkan untuk beberapa jenis komoditas tertentu, petani atau nelayan tidak perlu membayar kembali pinjamannya karena uang kredit lebih diperlakukan sebagai tanda pengikat pembelian. Pada kenyataannya, pedagang pengumpul ternyata menetapkan harga di bawah harga pasar. Di Desa Mertasinga, Cirebon, diperkirakan hampir semua nelayan terikat dengan sistem kredit semacam ini.

Beberapa faktor yang ditemukan di lapangan berkaitan dengan akses masyarakat terhadap suatu kredit antara lain: (1) mata pencaharian dan status ekonomi; (3) kedekatan dengan pengelola kredit, (4) kebijakan pengelola kredit, misal UED-SP di Desa Buyut sampai dengan saat penelitian tidak diperuntukkan bagi pamong desa; (5) jaringan kerja/usaha, misal nelayan yang memiliki patron kerja dengan para juragan/pemilik kapal atau para bakul, (6) aktivitas dalam suatu kelompok (misal Posyandu, arisan), dan (7) informasi, semakin cepat memperoleh informasi maka aksesnya semakin mudah.

3.2.2 Hambatan

Beberapa faktor yang menjadi kendala bagi masyarakat untuk berhubungan dengan lembaga perbankan, termasuk BRI Unit, antara lain adalah:

1. Kendala Budaya

Sikap penilaian diri sendiri (*self-assessment*) sebagian besar masyarakat desa yang merasa dirinya hanyalah sebagai '*wong cilik*', "berpendidikan rendah", serta "jarang berhubungan dengan Bank" telah menyebabkan mereka merasa 'enggan dan takut' berhubungan dengan bank formal seperti BRI. Perilaku semacam ini juga berlaku ketika berurusan dengan instansi pemerintah atau lembaga-lembaga formal lainnya.

Sikap semacam ini cenderung lebih menonjol dikalangan nelayan kecil yang kebanyakan berpendidikan SD dan jarang berhubungan langsung dengan perbankan. Kemiskinan yang menekan dan kehidupan melaut yang tidak membutuhkan keahlian dengan latar belakang pendidikan formal yang tinggi diduga telah ikut mempengaruhi sikap para orang tua (nelayan) untuk tidak menyekolahkan anaknya, terutama yang laki-laki. Nampak sedikit berbeda dengan kaum nelayan di Desa Mertasinga, kalangan petani di Desa Buyut, menyatakan "tidak takut" berhubungan langsung dengan bank bila terdapat fasilitas pinjaman kredit pertanian yang dapat di akses langsung tanpa melalui kelompok atau lembaga lainnya. Sikap ini khusus berlaku pada para petani yang pernah meminjam

Kredit Usaha Tani (KUT). Walaupun mereka juga ‘mengakui’ belum melunasi KUT karena terjadi ‘kegagalan panen’.⁴⁴

2. Kendala pola pendapatan (pendapatan tidak tetap vs sistem angsuran teratur)

Ketidakteraturan pola penghasilan anggota masyarakat menyebabkan sulitnya anggota masyarakat untuk dapat mengakses skema kredit. Misalnya, pola musim laut yang tidak teratur secara bulanan sepanjang tahun mau tidak mau menyebabkan nelayan menjadi kelompok masyarakat dengan pola pendapatan tidak teratur (*irregular income*). Kondisi ini tidak sesuai dengan pola dan sistem pengembalian pinjaman (*repayment*) perbankan yang kebanyakan mensyaratkan angsuran teratur secara bulanan (*monthly installment*). Padahal potensi daya pengembalian pinjaman (*repayment capacity*) nelayan atau petani sebetulnya cukup tinggi. Kenyataan ini merupakan indikasi kuat bahwa skema perkreditan yang bersifat musiman (*seasonal loan*), yang disesuaikan dengan pola penghasilan masyarakat sangat dibutuhkan.

3. Kendala kepemilikan jaminan tambahan (tidak mempunyai kepemilikan jaminan tambahan)

Status legal pemilikan tanah dan rumah di kalangan masyarakat desa masih berupa “segel” atau “akta jual beli”. Status semacam ini belum dianggap syah dan tidak memenuhi persyaratan sebagai jaminan untuk mengajukan pinjaman di bank. Sementara itu, disisi lain masyarakat desa masih merasa bahwa biaya proses sertifikasi sangat mahal dan berbelit-belit.

Persoalan diatas merupakan persoalan umum dan sudah lama menjadi perhatian pemerintah maupun pihak perbankan. Program Sertifikasi Nasional (Prona) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia, c.q. Badan Pertanahan Nasional nampaknya masih belum mampu menyelesaikan persoalan ini. Sementara itu, dari sisi perbankan, khususnya BRI Unit, pada tahun 1999 telah mengupayakan adanya program pemberian kredit tanpa jaminan, namun sampai sekarang belum ‘dijalankan’ dengan sungguh-sungguh sehingga dampaknya bagi kalangan masyarakat desa belum terasa.

Dari beberapa informan kunci diperoleh keterangan bahwa sebenarnya masyarakat di perdesaan (petani dan nelayan) pada umumnya sangat jujur. Meskipun tidak menyerahkan jaminan tambahan, sejauh prosedur akad kredit dilakukan secara resmi diatas ‘segel’ (meterai), pada umumnya sudah dianggap legal dan petani/nelayan sudah takut untuk tidak mengembalikan pinjaman. Jadi yang menjadi persoalan adalah bagaimana akses tersebut tetap dapat dibuka tanpa perlu adanya jaminan sertifikat, tetapi kelancaran pengembalian kredit tetap terjamin.

⁴⁴ Pernyataan diatas masih merupakan hipotesa yang sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama bila Pemerintah Indonesia berniat untuk memperbaiki skema kredit pertanian. Beberapa petani yang diwawancarai SMERU menyatakan bahwa “kredit pertanian” masih sangat dibutuhkan. Terjadinya tunggakan KUT di samping karena ‘gagal panen’ (karena serangan hama dan penyakit, atau kekeeringan) juga administrasi penyaluran kredit yang mengandung banyak kelemahan dan peluang terjadinya penyimpangan bukan pada tingkat petani.

4. Prosedur dan persyaratan pinjaman perbankan yang rumit

Pemberlakuan azas *prudential banking* yang ketat oleh kalangan perbankan, termasuk BRI Unit, yang mengharuskan berbagai persyaratan administratif formal masih dirasakan oleh masyarakat sebagai prosedur yang rumit dan berbelit-belit. Kondisi ini telah menyebabkan banyak masyarakat (nelayan) terpaksa memilih untuk meminjam kepada para bakul/tengkulak dan lembaga non formal seperti pelepas uang yang tidak memberlakukan persyaratan macam-macam, meskipun harus dikenakan 'biaya pinjam' sangat tinggi.

5. Kendala takut menghadapi tunggakan

Adanya pengalaman tunggakan pengembalian program kredit nelayan yang tinggi di masa lalu telah 'menghantui' (*arrears phobia*) kalangan perbankan, termasuk BRI Unit atau bank formal lainnya untuk memberikan persetujuan pinjaman baru kepada masyarakat nelayan atau petani. Patut diketahui bahwa pemberian kredit oleh bank ketika itu juga sudah memberlakukan adanya jaminan tambahan, namun demikian tetap mengalami kemacetan pengembalian. Pengalaman ini mengajarkan bahwa persyaratan jaminan tambahan (*collateral*) ternyata tidak selalu paralel dengan tingkat pengembalian yang lebih baik. Jadi, terdapat aspek-aspek non-collateral lain yang lebih bermakna dan perlu dipertimbangkan oleh kalangan perbankan ketika memberikan pelayanan kredit kepada masyarakat.

6. Rentabilitas dan tingkat pengembalian pinjaman yang tinggi

Pelaksanaan sistem perbankan secara profesional sering diukur antara lain oleh tingkat pengembalian pinjaman yang tinggi (*high collection rate policy*) yang menjamin rentabilitas yang tinggi pula. Untuk mempertahankan tampilan kinerjanya, bank-bank formal, termasuk BRI Unit, dituntut untuk selalu mengusahakan agar tingkat pengembalian selalu baik (misalnya diatas 95%).

Konsekuensi logis dari pemberian kredit yang sangat selektif ini menyebabkan hanya golongan tertentu dalam masyarakat yang akhirnya dapat mengakses kredit. Misalnya di Kabupaten Tanggamus, relatif hanya masyarakat di Dusun Kapuran yang memiliki persentase cukup besar untuk bisa mengakses Kupedes yaitu sekitar 10% karena cukup banyak PNS (golongan berpenghasilan tetap) serta pengusaha/pedagang yang bermukim di desa tersebut, sementara di Desa Kalibening, persentase warga desa yang mampu mengakses Kupedes di bawah 5%. Di sisi lain fenomena ini menjelaskan bahwa skema kredit seperti Kupedes boleh jadi sejak awal memang tidak terjangkau oleh lapis terbawah masyarakat desa yang umumnya tidak mampu memenuhi persyaratan standar untuk memperoleh Kupedes.

3.2.3 Pilihan dan Harapan

Bagi masyarakat golongan menengah ke atas (termasuk juga pedagang), dan Golbertap, tetap memilih BRI atau Bank lain dalam memperoleh fasilitas kredit. Bagi para nelayan atau masyarakat yang memiliki jaringan kerja/usaha (mebel, rotan), kredit yang disediakan patron kerja/usaha tetap menjadi pilihan. Tanpa memperhatikan pengalaman gagalnya berbagai kredit program, masyarakat senang dengan adanya kredit program. Selain itu, adanya berbagai kendala dalam mengakses pada skema kredit formal menyebabkan masyarakat tetap memilih kredit informal seperti *rentenir*/bank keliling,

khususnya untuk keperluan mendadak dan bagi mereka yang malu diketahui anggota masyarakat lain.

Bagi beberapa anggota masyarakat, skema tersebut terpaksa dipilih karena kesulitan mengakses kredit formal. Para nelayan dan para petani masih menghendaki skema kredit formal yang sesuai dengan siklus pendapatannya (baik jumlah maupun waktu angsuran). Sementara masyarakat umum juga menghendaki skema program yang menerapkan sanksi bagi penunggak dan penghargaan bagi yang membayar tepat waktu.

IV. KESIMPULAN

1. Istilah 'krismon' sudah sangat populer di kalangan penduduk perdesaan. Istilah 'krisis ekonomi' ditafsirkan sebagai situasi harga-harga barang kebutuhan rumah tangga maupun sarana produksi yang 'berubah mahal dan tidak wajar'. Khusus di kalangan petani, "krismon" ditafsirkan sebagai situasi "paceklik" (gagal panen) yang dirasakan semakin berat dengan semakin mahalnya harga sarana produksi pertanian dan rendahnya nilai tukar hasil-hasil pertanian di tingkat petani, terutama ketika masa panen raya. Meskipun demikian, kemiskinan yang sudah sejak lama mereka rasakan (*stagnant poor*) telah menyebabkan mereka sudah 'tidak mampu' lagi membedakan derajat kesusahan kehidupan dirinya sendiri semasa periode sebelum dan selama periode krisis ekonomi (1997 s/d 2000).
2. Karakteristik dan pola pendapatan petani dan nelayan yang relatif kecil, tidak teratur, serta sangat tergantung dengan musim (*irregular and seasonal income*) telah ikut mengakibatkan rendahnya akses terhadap fasilitas permodalan dari lembaga keuangan formal dan perbankan. Kondisi ini telah melestarikan ketergantungan kepada pelepas uang dengan tingkat suku bunga yang relatif sangat tinggi. Oleh karena itu, kaum petani dan nelayan pada dasarnya lebih mengharapkan adanya pinjaman musiman dimana terdapat bulan yang diperkenankan untuk tidak mengangsur (*seasonal loan with grace period*).
3. Khusus di kalangan masyarakat nelayan, banyak yang masih terikat pinjaman dengan para bakul kecil 'pemilik uang'. Bakul-bakul tersebut pada umumnya adalah masih tetangga atau warga dalam desa sendiri. Kebanyakan bakul telah mempunyai akses permodalan ke lembaga keuangan formal dan perbankan formal seperti Badan Kredit Desa (BKD) di tingkat desa dan Bank Rakyat Indonesia atau BRI Unit yang berlokasi di kecamatan setempat. Meskipun demikian, permodalan para bakul tersebut ternyata juga masih terikat pada tengkulak atau pengusaha di desa (*local entrepreneurs*) yang ternyata juga masih terikat didalam jejaring dengan pengusaha besar dari luar kota (*vertical business network*).
4. Berdasarkan perkiraan rata-rata pendapatan nelayan di Desa Mertasinga dan rata-rata konsumsi rumah, diduga akan terdapat '*excess liquidity*' sebagai '*potential saving*' atau '*repayment capacity*' sekitar Rp. 400 ribu per bulan. Namun mempertimbangkan bahwa dalam satu tahun musim laut terdapat empat bulan dengan produksi rendah, maka para nelayan lebih mengharapkan adanya fasilitas pinjaman musiman dengan jangka waktu satu tahun dengan angsuran sebanyak tujuh kali, artinya pada waktu musim paceklik diperkenankan tidak mengangsur (*grace period* ditengah masa kredit).

5. Rata-rata pendapatan petani di Desa Buyut adalah Rp. 1,5 juta per hektar per musim, sehingga para petani juga mengharapkan adanya pola kredit pertanian yang memberikan fasilitas berdasarkan musim (misalnya tiga kali angsuran):
 - *Angsuran Pertama*, sebesar 25% dari hasil panen Musim Hujan, karena petani peminjam masih membutuhkan dana modal MT Musim Gadu
 - *Angsuran Kedua*, 50% dari hasil panen Musim Gadu, karena petani peminjam masih membutuhkan dana modal tanam untuk Musim Hujan berikutnya, tetapi sudah memiliki sisa dana yang lebih cukup.
 - *Angsuran Ketiga*, 25% dari hasil panen Musim Hujan berikutnya, karena pada tahap ini petani telah mampu melunasi hutangnya sekaligus lebih mampu mencukupi kebutuhan permodalan tanam musim-musim berikutnya.
6. BRI Unit merupakan lembaga perbankan yang populer dan diinginkan oleh banyak kalangan masyarakat perdesaan. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara permintaan dan penawaran di sektor fasilitas pinjaman (*supply and demand gap*). Beberapa faktor yang menjadi kendala bagi masyarakat untuk berhubungan dengan lembaga perbankan, termasuk BRI Unit, antara lain:
 - 6.1 Kendala budaya. Perasaan sebagai orang desa yang berpendidikan formal rendah telah menimbulkan sikap enggan dan takut berhubungan dengan bank maupun institusi formal lainnya.
 - 6.2 Kendala pola pendapatan. Pola penerimaan musiman dan tidak teratur tidak sesuai dengan pola pinjaman perbankan yang mensyaratkan angsuran teratur secara bulanan (*irregular income vs. regular installment system*).
 - 6.3 Kendala kepemilikan jaminan. Status legal pemilikan tanah dan rumah di kalangan masyarakat desa masih berupa “segel” atau “akta jual beli”. Status semacam ini belum dianggap sah dan tidak memenuhi persyaratan sebagai sebuah jaminan untuk mengajukan pinjaman di bank (*lack of collateral*).
 - 6.4 Kendala administratif. Pemberlakuan azas *prudential banking* lebih ditafsirkan oleh kalangan perbankan sebagai pengharusan berbagai persyaratan administratif formal menurut masyarakat perdesaan prosedur yang kompleks dan berbelit-belit. Kondisi semacam ini telah mengakibatkan banyak masyarakat perdesaan akhirnya terpaksa meminjam kepada para bakul, tengkulak dan lembaga non formal seperti pelepas uang yang tidak memberlakukan persyaratan macam-macam meskipun harus dikenakan ‘biaya pinjam’ sangat mahal.
 - 6.5 Kendala takut menghadapi tunggakan. Pengalaman tunggakan pengembalian program kredit nelayan yang tinggi dimasa lalu telah ‘menghantui’ (*arrears phobia*) kalangan perbankan (termasuk BRI) untuk memberi pinjaman baru kepada masyarakat nelayan.
 - 6.6 Rentabilitas dan kebijakan pengembalian pinjaman yang tinggi. Pelaksanaan *professional banking system* sering diukur antara lain oleh tingkat pengembalian pinjaman yang tinggi yang menjamin rentabilitas yang tinggi pula. Kebijakan *collection rate* selalu diatas 95% telah menimbulkan kecenderungan di kalangan perbankan untuk lebih memberikan pinjaman kepada kalangan perdagangan dan kelompok berpenghasilan tetap (*fixed income group*).
7. Suasana krisis ekonomi’ memang juga dirasakan di wilayah Cirebon, antara lain terlihat dari adanya ‘penurunan’ realisasi jumlah Kupedes pada tahun 1998. Meskipun demikian pada saat yang sama juga terdapat semacam ‘*blessing in disguised*’ bagi BRI di Cirebon, yaitu terjadinya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan swasta, ternyata telah ikut mempengaruhi peningkatan tajam jumlah Simpedes di BRI Unit sebagai bank milik pemerintah. Namun, posisi

simpanan yang jauh melampaui posisi kredit tersebut seringkali disalahtafsirkan oleh beberapa kalangan sebagai peristiwa terjadinya pelarian modal dari desa ke kota (*capital flight*) oleh BRI.

8. Hampir mirip dengan sikap '*over prudent*' di kalangan perbankan, persepsi negatif tentang pola pendapatan dan kehidupan petani maupun nelayan telah menyebabkan BPR Klayan juga lebih mengutamakan penyediaan pinjaman permodalan untuk sektor perdagangan dan golongan berpenghasilan tetap (*fixed income group*) dengan pola angsuran bulanan 12 kali selama satu tahun. Posisi simpanan BPR Klayan relatif kecil dan di bawah posisi *outstanding* pinjaman. Posisi simpanan ini juga merupakan salah satu indikator bahwa tingkat kepercayaan masyarakat perdesaan terhadap BPR masih rendah. Kondisi semacam ini tentu akan menambah beban biaya dana (*cost of fund*) terlebih lagi bila dipertimbangkan bahwa sumber permodalan BPR Klayan adalah dana pinjaman dari Bank Mandiri (ex Bank Exim) yang mengenakan tingkat suku bunga pasar sebesar 20% per tahun (pada tahun 1998 malah mencapai 30% per tahun).
9. Kedekatan hubungan dan saling kenal antara petugas pengelola Badan Kredit Desa (BKD) dengan masyarakat secara positif telah mampu membentuk suatu struktur hubungan kepercayaan dalam pemberian pinjaman modern. Dan karenanya, prosedur pemberian pinjaman di BKD dapat dilaksanakan secara sangat mudah, sederhana dan tidak mensyaratkan adanya jaminan tambahan (*non collateral loan*). Selama masa krisis ekonomi perkembangan usaha BKD di wilayah Cirebon memang mengalami sedikit penurunan. Meskipun demikian, secara umum tanggapan dan sikap masyarakat perdesaan terhadap pelayanan BKD cukup positif. BKD di Desa Mertasinga malah dapat meningkatkan jumlah pinjaman kepada masyarakatnya.
10. Adanya berbagai permasalahan dalam pelaksanaan KUT oleh koperasi-koperasi KUD yang ada di wilayah Kecamatan Cirebon Utara, maka KUD Mina Waluyo di Desa Mertasinga (lebih dikenal sebagai KUD Bondet) yang lebih menekankan pelayanan di sektor perikanan, pada tahun 1992 telah ditunjuk oleh Kantor Departemen Koperasi di Cirebon untuk ikut menjadi 'pengelola' kredit usaha tani (KUT) bagi seluruh KUD yang ada di wilayah Kecamatan Cirebon Utara. Hal ini dikenal sebagai 'amalgamasi KUD' atau 'penggabungan organisasi' KUD agar KUT tetap dapat dilaksanakan di Kecamatan Cirebon Utara (termasuk KUD "Kerti" Desa Buyut yang kini sudah tidak beroperasi lagi).
11. Organisasi pengelolaan pelaksanaan KUT dinilai oleh pengurus maupun petani sebagai sangat kompleks. Proses pengambilan keputusan oleh pengurus KUD harus melibatkan banyak instansi dan lembaga, seperti KUD Induk, BRI, PT Pusri. Kompleksitas persoalan pelaksanaan KUT tersebut semakin dirasakan berat oleh pengurus KUD Bondet ketika banyak tunggakan KUT yang ternyata malah berada pada pengurus Kelompok KUT. Penyimpangan semacam ini disebabkan oleh dua hal: pertama, menahan setoran angsuran KUT yang sudah dibayar petani; kedua: 'KUT fiktif', yaitu banyak kredit KUT yang ternyata tidak dimanfaatkan langsung oleh penggarap, melainkan oleh pengurus Kelompok Tani dan/atau oleh oknum pamong desa yang 'numpang nama' tetapi tidak memiliki sawah garapan sendiri. Penggarap yang sesungguhnya justru tidak memperoleh KUT. Pengelolaan kredit usaha tani secara individual dengan sistem perbankan yang profesional dimungkinkan untuk berjalan lebih baik daripada dengan sistem kelompok seperti sekarang ini. Sistem individual melalui perbankan seyogyanya menerapkan persyaratan prosedur secara sederhana.
12. Selama ini terdapat berbagai jenis program penyediaan fasilitas permodalan bergulir yang secara khusus diprakarsai oleh pemerintah (*revolving fund programs*). Di Desa

Mertasinga dan Desa Buyut maupun di desa-desa lain di wilayah kecamatan Cirebon Utara, pelaksanaan program-program ini diduga telah mengalami kegagalan dalam arti bahwa tidak ada dana yang mampu dikembangkan dan bergulir sesuai dengan tujuan program.

13. Di Desa Buyut, pengalaman ‘kegagalan’ beberapa kredit program mengarah pada indikasi bahwa ‘kredit program pemerintah’ akan senantiasa gagal. Kata ‘pemerintah’, yang diartikan oleh masyarakat sebagai ‘bantuan yang tidak perlu dibayar kembali’ menjadi salah satu penyebab. Bagi masyarakat yang ingin membayar, lama kelamaan menjadi surut niatnya ketika mengetahui peminjam lainnya tidak membayar dan tidak dikenai sanksi. Bagi pengelola, sering enggan menagih pinjaman karena selalu diejek masyarakat dengan kata-kata ‘*kenapa harus sibuk menagih uang yang bukan kepunyaannya*’. Bagaimanapun lembaga resmi perbankan tetap menjadi jaminan agar masyarakat bersedia membayar pinjamannya dibandingkan ‘program pemerintah’.
14. Secara umum, untuk tetap mempertahankan kegiatan ekonomi sehari-hari sebagian besar masyarakat di Desa Mertasinga dan Buyut masih tetap terikat dengan ‘renternir’ atau ‘pelepas uang’ (*money lenders*) yang beroperasi secara berkeliling dengan sistim angsuran harian.
15. Kredit ‘*mijndreeng*’ (*mindring*) masih populer di perdesaan. Barang-barang yang ditawarkan oleh *mindring* pada umumnya berupa peralatan dapur, seperti piring, gelas, panci, thermos maupun barang kebutuhan lain seperti kain, jam dinding, dan barang-barang kebutuhan rumah tangga lainnya. Masyarakat perdesaan tetap memanfaatkan fasilitas “*mindring*” karena alasan: pertama mereka memang tidak punya kemampuan menyediakan uang tunai. Kedua, ‘menghemat’ waktu dan biaya transport bila mereka harus jalan sendiri ke pasar di kota. Pemahaman ini menunjukkan bahwa masyarakat desa sudah mempunyai *economic sence* yang cukup rasional. Mereka juga mempunyai konsep *opportunity cost* yang cukup realistik; pergi ke kota, di samping mengeluarkan biaya transport juga berarti akan hilangnya kesempatan untuk bekerja.
16. Tata niaga usaha warungan (kios) di desa tidak dapat menghindarkan adanya ‘sistim *ngebon*’. Dalam sistim ini transaksi jual beli dilakukan dimana pihak pembeli dapat mengambil barang terlebih dahulu dan membayarnya kemudian dengan harga yang tidak berubah atas dasar hubungan kekerabatan bertetangga dan saling percaya dan saling menguntungkan. Dari pihak pengusaha warung, hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan volume penjualannya. Sedang dari pihak ‘*pengebon*’ (pembeli) hal ini dilakukan karena ketidak mampuan mereka dalam menyediakan uang tunai (*cash*). Kebiasaan semacam ini memang sudah lazim terjadi masyarakat di perdesaan terutama dikalangan nelayan, petani maupun kaum pekerja pabrik (buruh). Sedangkan barang-barang yang dibeli biasanya lebih berupa bahan-bahan konsumsi sehari-hari dan kebutuhan pokok lainnya.
17. Arisan adalah kegiatan yang memadukan antara ‘kebutuhan sosial’ dan ‘kebutuhan ekonomis’ yang berada pada tingkat komunitas. Perimbangan antara kedua kebutuhan tersebut bervariasi tergantung dari kesepakatan kelompok yang bersangkutan. Dalam perkembangannya, bentuk arisannya sendiri tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang (*inkind*) seperti berupa alat kebutuhan rumah tangga. Dan bahkan arisan bahan bangunan berupa arisan semen, arisan keramik atau arisan kayu kini semakin populer di desa. Arisan bahan bangun ini secara positif telah ikut mendorong peningkatan kualitas bangunan perumahan di kalangan masyarakat perdesaan. Harga bahan bangunan ditetapkan mengikuti harga pasar,

sehingga jumlah dan kualitas bahan bangunan yang diterima tidak berkurang meskipun harganya naik.

18. Di kalangan nelayan di desa Mertasinga Cirebon terdapat fasilitas permodalan yang terkait dengan jaringan usaha yang bersifat vertikal' dengan lini pelaku usaha di atasnya (*vertical linkages*). Fasilitas permodalan ini dapat diakses oleh nelayan, bakul, tengkulak maupun pengusaha karena mereka mempunyai 'ikatan jaringan usaha' (*business net work*).

Di kalangan nelayan jaringan usaha yang paling intensif dapat dijumpai adalah usaha rajungan (di samping kerang dan ikan). Jaringan ini mulai populer di desa semejak masuknya usaha-usaha pengolahan pengupasan daging rajungan (*mini-plant*) di tingkat desa, yang pengelolaannya diserahkan kepada pengusaha pengupasan rajungan di desa. Kondisi semacam ini pada akhirnya telah menciptakan persaingan yang ketat dalam mata rantai perdagangan rajungan, terutama untuk mempertahankan kontinuitas perolehan *supply* bahan baku rajungan. Kondisi ini pada akhirnya telah ikut mempengaruhi munculnya penyediaan fasilitas permodalan (pinjaman) yang disediakan oleh pihak jaringan usaha di atasnya (*up-liner*), yaitu antara: (i) nelayan dengan bakul; (ii) bakul dengan pengepul yaitu pengelola *mini-plant* di dalam desa; dan (iii) pengelola *mini-plant* dengan perusahaan/pabrik pengolahan rajungan yang berada di luar kota. Fasilitas pinjaman tersebut dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan primer penangkapan rajungan, seperti untuk membeli dan/atau memperbaiki jaring, mesin kapal atau kapal. Selama rajungan dijual kepada pemberi pinjaman (*up-liner*), uang pinjaman yang bersangkutan "tidak perlu dikembalikan" dan dianggap sebagai tanda pengikat agar peminjam (*down liner*) selalu menjual rajungan kepadanya.

© LAMPIRAN ©

Lampiran 1. Skema Kredit yang Ditemui di Desa Penelitian

No	<i>Skema Kredit</i>	Desa Mertasinga	Desa Buyut
I.	Formal		
	A. LKB		
	1. BRI	v	v
	2. Bank BNI	v	-
	3. Danamon	v	-
	4. BPD	v	v
	5. BPR	v	-
	6. BKD	v	v
B.	LKBB		
	7. KUD	v	v
	8. Koppas	-	v
II.	Informal		
	9. <i>Mindring</i>	v	v
	10. <i>Rentenir</i>	v	v
	11. Arisan	v	v
	12. Warung/Kios	v	v
	13. Tetangga/Saudara	v	v
III.	Program		
	14.KUT	-	v
	15.PDM-DKE	vv	vv
	16.UED-SP	vv	vv
	17.UP2K	vv	Vv

Keterangan : v = Telah ada sejak sebelum krisis; vv = Ada sejak krisis;

Lampiran 2. Sumber Informasi di Tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan Propinsi di Kabupaten Cirebon

Desa	Kecamatan	Kabupaten	Propinsi
<ul style="list-style-type: none"> • Kepala, Sekretaris, dan pamong desa • Aktivistis LKMD • Ketua RT dan RW • Ketua Kelompok Tani • Tokoh masyarakat (petani kaya, pemilik penggilingan padi, pengurus masjid, Badan Desa, aktivis Posyandu, Guru) • Petani (sawah) • Nelayan • <i>Bakul, pengepul</i> ikan, pedagang pengumpul hasil laut • Pengusaha pengolah ikan • <i>Juragan</i>, pemilik kapal • Pemilik kios (umum dan saprodi) • Pemilik warung (bakso, soto, <i>warteg</i>) • Responden: <ul style="list-style-type: none"> - KPS/KS-1 peminjam - KPS/KS-1 non-peminjam - Non-KPS/KS1 peminjam - Non-KPS/KS-1- non-peminjam • Pengelola Kredit • Masyarakat umum (anggota arisan, ibu rumah tangga, pengurus kelompok arisan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Camat/Sek-Cam/Staf • Kepala/Staf BRI Unit • Kepala/Staf BPR • Mantri Statistik • Penyuluh Petanian • Pengurus KUD • LSM 	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda Bidang Perekonomian • Dinas Perekonomian Pemda • Dinas Pertanian • Dinas Perikanan • Kantor Cabang BRI • BPS 	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda Bidang Perekonomian